

Kedudukan dan Peran Dayah
Di Aceh Pada Masa Revolusi Kemerdekaan
(1945-1949)

Drs. H. Shabri, dkk

Badan Perpustakaan Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam
2005

PENGOLAHAN :	
No. Inv. :	
No. Klass.	377-97 / KED
Tgl. Terima :	

**KEDUDUKAN DAN PERANAN DAYAH
DI ACEH PADA MASA REVOLUSI
KEMERDEKAAN
(1945-1949)**



- Hak Cipta : Pada Penulis
Hak Penerbitan : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh
- Cetakan : Pertama, 2000
Kedua, 2005
- Penulis : Drs. H. Shabri A.
Sri Wahyuni, S. Sos.
Drs. Seno
Drs. Agus Budi Wibowo, M. Si.
- Konsultan : Drs. H. Rusdi Sufi
- Editor : Sudirman, S. S.
Balai kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh
Kedudukan dan Peranan Dayah di Aceh pada Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)
- ISBN : 979-91664-12-5
- Setting/layout : Sudirman, S. S.
Pewajah Cover : Iskandar Eko Priyotomo, S.S.
- Penerbit : Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2005

SAMBUTAN

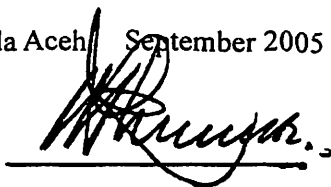
Kepala Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Di hadapan kita telah terbuka sebuah buku dengan judul Kedudukan dan Peranan Dayah di Aceh pada Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949). Dengan terbitnya buku ini, selain menambah informasi tentang sejarah dan budaya Aceh juga memperkaya khazanah literatur tentang Aceh.

Penelitian dan pengkajian yang bertujuan untuk menggali kembali nilai-nilai sejarah dan budaya daerah sebagai akar kebudayaan nasional diharapkan dapat menumbuhkembangkan sikap cinta tanah air dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap sejarah dan kebudayaan daerah.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan, terutama kepada penulis dan kerja sama yang baik dengan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, sehingga memungkinkan terbitnya buku ini. Akhir kata, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi pembaca.

Banda Aceh, September 2005



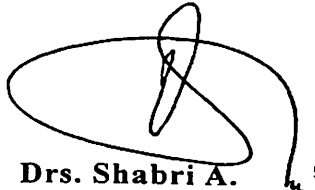
Drs. Kamaruddin H. Husein, M. Si.
Pembina Utama Madya/070006626

PENGANTAR PENERBIT

Keberadaan dayah di Aceh telah ada bersamaan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam itu sendiri. Dayah sebagai suatu lembaga sosial dan lembaga pendidikan Islam di Aceh, telah banyak melahirkan tokoh-tokoh yang berpengaruh dan berperan dalam masa perang kolonial Belanda dan masa revolusi kemerdekaan. Karenanya, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, melakukan kajian dan pendokumentasian keberadaan dayah ini dalam rangka melihat keberadaan lembaga ini pada masa revolusi kemerdekaan. Diharapkan dari hasil kajian dan pendokumentasian ini dapat digunakan sebagai "jembatan" antara masa lalu dengan masa kini untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap sejarah bangsanya. Untuk itu, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh bekerjasama dengan Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pemda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menerbitkan cetakan/edisi kedua, setelah melalui beberapa perbaikan.

Banyak pihak yang telah berperan serta sehingga karya tulis ini dapat disajikan dalam bentuk seperti ini, sepatutnya kami ucapkan terima kasih. Kami menyadari sepenuhnya, hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan selanjutnya. Akhir kata, mudah-mudahan karya ini bermanfaat.

Banda Aceh, September 2005
Kepala Balai Kajian Sejarah
dan Nilai Tradisional Banda Aceh



Drs. Shabri A.
NIP. 131412260

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	iii
Pengantar Penerbit	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN ACEH BESAR....	7
A. Latar Belakang Daerah	7
1. Letak dan Luas	7
2. Keadaan Alam dan Lingkungan Fisik	10
B. Keadaan Sosial Budaya	13
1. Penduduk	13
2. Mata Pencarian	16
3. Pendidikan	19
4. Sistem Religi	21
BAB III LEMBAGA PENDIDIKAN DAYAH DI ACEH	27
A. Sistem Pendidikan Sebelum Revolusi Kemerdekaan	27
1. Sistem Pendidikan Pada Masa Kesultanan	27
2. Sistem Pendidikan Pada Masa Kolonial Belanda	39
3. Sistem Pendidikan Pada Masa Pendudukan Jepang	48
B. Struktur Dayah Pada Masa Revolusi Kemerdekaan	50
1. Kepemimpinan Dayah	50
2. Hubungan Murid dengan Guru.....	52
3. Lingkungan dan Sosio - Psikologis	54
4. Sistem Ilmu dan Pendidikan Dayah	56

BAB IV KEDUDUKAN DAN PERANAN DAYAH DI ACEH PADA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN ...	60
A. Kondisi dan Situasi Dayah pada Masa Revolusi Kemerdekaan	63
B. Kedudukan dan Peranan Dayah Dalam Bidang Sosial Budaya	69
C. Peranan Dayah Dalam Bidang Politik	84
BAB V PENUTUP	91
Daftar Pustaka	94
Daftar Informan	97

BAB I

PENDAHULUAN

Aceh adalah suatu daerah yang terletak di bagian paling utara pulau Sumatera. Sejak tahun 1959 daerah ini telah ditetapkan sebagai Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mempunyai otonomi yang seluas-luasnya terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan pendidikan.

Berdasarkan beberapa sumber sejarah dan arkeologi, agama Islam pertama masuk ke Indonesia adalah di Aceh. Masuk dan berkembangnya Islam di Aceh, telah menjadikan rakyat Aceh secara keseluruhan menganut agama Islam. Pengaruh Islam begitu kuat sehingga pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat Aceh dalam kehidupan sehari-hari sedapat mungkin disesuaikan dengan kaidah-kaidah Islam (Sufi, 1996: 1-2). Di samping itu, pengaruh adat istiadat/tradisi terhadap pelaksanaan ajaran Islam sangat berpengaruh.

Di dalam masyarakat Aceh sejak masa kanak-kanak telah dikenalkan dengan sistem pendidikan Islam. Dimulai dengan belajar pada orang tuanya ataupun seorang *teungku* yang khusus mengajar anak-anak dalam suatu *gampong* (desa) selepas magrib atau pagi hari, baik oleh seorang *teungku* pria maupun wanita. Pada pendidikan tingkat dasar ini, khusus untuk anak-anak pria pendidikan dilaksanakan di *meunasah* sebagai suatu lembaga pendidikan yang dapat dianggap formal. Selanjutnya, lembaga pendidikan tingkat menengah disebut dengan *ranggang*. *Ranggang* ini dibangun oleh

masyarakat *gampong* dan dikelola oleh *teungku-teungku* yang telah memperoleh pendidikan lebih tinggi dari *rangrang*. Adapun lembaga pendidikan yang lebih tinggi dari *rangrang* disebut *dayah*. *Dayah* didirikan atau dikelola oleh seorang *teungku chiek* dan disebut dengan *dayah teungku chiek* (Sufi, 1996: 10-11).

Perkembangan *dayah* di Aceh menunjukkan bahwa lembaga pendidikan ini muncul di berbagai tempat sesuai dengan perkembangan agama Islam itu sendiri. Semenjak kerajaan Islam mulai dikenal (abad 13), pusat pendidikan Islam yang pertama adalah *Dayah Cot Kala* yang didirikan oleh Teungku Chiek Muhammad Amin di Aceh Timur. Kemudian, sesudah Kerajaan Indra Purba (Aceh Besar) menjadi kerajaan Islam dengan nama Kerajaan Darussalam Banda Aceh, didirikan pula *Dayah Lam Peuneu'eun* di bawah pimpinan Syekh Abdullah Kan'an yang dikenal dengan Teungku Chiek Lam Peuneu'eun (Ismuha, 1983: 30).

Pada masa perang kolonial Belanda di Aceh, *dayah* menunjukkan fungsinya sebagai lembaga penghasil pemimpin perang sabil (ulama). Selain itu para ulama juga mempergunakan *dayah* sebagai tempat menggodok para pejuang untuk menghimpun kekuatan menghadapi Belanda. Teungku Chiek Di Tiro misalnya telah menginsyafkan orang dengan lisan dan tulisan untuk berjuang mengangkat senjata. Hal yang sama dilakukan pula oleh Teungku Chiek Kuta Karang, Teungku Chiek Pante Kulu, Teungku Fakinah, Teungku Tapa dan lainnya (Sufi et al., 1997: 41-57).

Dayah sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah tumbuh di tengah-tengah masyarakat serta mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat merupakan sistem pendidikan yang umumnya masih menganut cara tradisional. Setiap *murid* tinggal di pondok yang biayanya diperoleh dari bantuan masyarakat, pemilik *dayah* dan guru

yang bersangkutan dan lain-lain. Salah satu ciri khas *dayah* yakni adanya ketergantungan antara *murib-muribnya* dengan guru (*teungku*), patuh dan tunduk pada setiap peraturan yang berlaku di *dayah*, hidup hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari supaya mampu menghadapi segala tantangan zaman. Dengan kondisi demikian, memudahkan bagi para ulama untuk dapat menggerakkan *murib* dan masyarakat sekitarnya dalam melakukan perang sabil, baik pada masa perang kolonial Belanda maupun pada masa Revolusi Kemerdekaan.

Pada masa pendudukan Jepang, keadaan sosial ekonomi rakyat lebih sulit. Banyak terjadi problem sosial dan ekonomi. Dalam bidang budaya, pada setiap upacara rakyat harus melakukan *seikerei*, suatu gerakan rukuk ke arah matahari terbit tempat bersemayamnya Tenno Heika. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada tidak dapat berkembang, masyarakat dan pemuda lebih ditekankan untuk latihan baris berbaris dan dipersiapkan untuk menghadapi perang.

Diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia tahun 1945 belum sepenuhnya membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu penjajahan. Belanda dengan membonceng sekutu kembali ingin berkuasa di Indonesia dan baru mengakui kedaulatan negara Indonesia pada tahun 1949 pada Konferensi Meja Bundar (KMB). Bagaimana kedudukan dan peranan *dayah* pada masa revolusi kemerdekaan di Aceh dalam bidang sosial budaya dan politik ?

Istilah *dayah* dalam masyarakat Aceh sama maksudnya dengan pengertian pondok atau pesantren dalam masyarakat Jawa atau beberapa tempat lainnya dalam negara Republik Indonesia. Menurut ejaan, kata *dayah* berasal dari kata *Zawiyah* (bahasa Arab) maksudnya suatu sudut dari bagian gedung atau rumah yang disediakan untuk

mengerjakan ibadah. Kemudian sesuai dengan lidah orang Aceh *zawiyah* berubah menjadi *dayah/deyah*. Pengertian *dayah* secara umum adalah suatu tempat atau lembaga pendidikan untuk mendidik para *murib* (Jalil, 1990: 3-4).

Dayah umumnya lahir bersama dengan cita-cita masyarakat, yaitu untuk memberikan pendidikan agama Islam kepada anak-anak, generasi muda dan bahkan kepada siapa saja yang berminat agar mereka selalu dapat berhubungan dengan Tuhan (beribadah) secara benar, berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta sesuai dengan perintah Tuhan. Namun setelah itu dalam perkembangannya, ketika *dayah* berusaha untuk mandiri, ia membentuk komunitas sendiri yang eksklusif di tengah masyarakatnya (Abdullah, 1997: 2).

Tumbuh dan berkembangnya *dayah* di berbagai daerah di Aceh tidaklah dalam waktu yang bersamaan, sesuai dengan perkembangan ajaran Islam dan untuk memenuhi berbagai tuntutan zaman sehingga batasan *spatial* penelitian ini adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Abubakar, 1995: 72), khususnya di Kabupaten Aceh Besar yang *dayah*nya dominan berperan pada masa revolusi kemerdekaan dan *dayah* tersebut masih eksis sampai sekarang.

Batasan temporal yang diajukan meliputi masa revolusi fisik dari tahun 1945-1949 dengan alasan belum adanya penelitian tentang kedudukan *dayah* di Aceh pada periode ini, baik dalam aspek sosial budaya dan politik. Namun di dalam pembahasan nantinya tidak dapat lepas dari periode-periode sebelumnya yaitu sistem pendidikan pada masa kesultanan, masa kolonial Belanda dan pada masa pendudukan Jepang. Berbicara mengenai *dayah* tentu harus mengetahui sistem pendidikan, sistem kepemimpinan, hubungan guru dan murid serta keadaan lingkungan dan sosio-psikologis dalam lembaga tersebut.

Penelitian dengan judul "Kedudukan dan Peranan Dayah di Aceh Pada Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)" ini mempunyai tujuan memberi manfaat baik bagi pemerintah, masyarakat serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Maksud dan tujuan penelitian ini di antaranya,

1. Untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang kedudukan dan peranan *dayah* pada masa revolusi kemerdekaan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara khususnya di Daerah Istimewa Aceh.
2. Menyajikan data kesejarahan secara faktual mengenai sejarah perkembangan *dayah* di Aceh sebagai lembaga pendidikan Islam sesuai dengan status istimewanya dalam bidang agama.
3. Menemukan solusi bagaimana mengantisipasi dan memanfaatkan *dayah* seoptimal mungkin sebagai sebuah kekuatan yang mampu menggalang persatuan umat Islam sebagai aset pembangunan bangsa.

Dalam usaha mewujudkan tulisan ini, dilakukan studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan terutama berupa wawancara dengan beberapa tokoh pemimpin *dayah* dan alumni *dayah* yang terlibat langsung maupun menjadi saksi pada masa dan peristiwa tersebut di atas. Studi pustaka dapat dilakukan dari berbagai sumber yang ada di perpustakaan yang ada di Banda Aceh seperti Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA), perpustakaan *dayah* yang telah ada pada masa revolusi fisik dan terus bertahan sampai sekarang seperti *dayah* Ulee Titi, *dayah* Tanoh Abee dan lainnya.

Dari bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan dalam kelompok sumber primer dan sekunder

(Gottschalk, 1983). Selanjutnya dituangkan dalam sebuah tulisan ilmiah dengan menerapkan langkah-langkah yang sesuai dengan tuntunan ilmu Sejarah. Bagaimanapun penulisan sejarah ini tidak dapat lepas dari berbagai pendekatan ilmu lain seperti sosiologi dan antropologi terutama untuk menjelaskan interaksi antara guru dan murid di dalam *dayah* serta lingkungan sosio-psikologisnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN ACEH BESAR

A. Latar Belakang Daerah

1. Letak dan Luas

Secara administratif, Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Wilayahnya meliputi sebagian daerah pesisir barat dan sebagian pesisir utara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Aceh Besar ini beribukota di kota Jantho. Adapun batas wilayah kabupaten ini adalah di sebelah utara Kabupaten Aceh Besar dibatasi oleh Selat Sumatera, di sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Aceh Jaya, di sebelah barat dibatasi oleh Samudera Indonesia, di sebelah Timur dibatasi oleh Kabupaten Pidie.

Keberadaan Selat Sumatra pada bagian utara dan Samudera Indonesia pada bagian barat wilayah Kabupaten Aceh Besar menyebabkan perbandingan luas wilayah daratan dengan wilayah lautan menjadi lebih luas wilayah lautan. Di bagian utara wilayah Kabupaten Aceh Besar, batas wilayah tersebut juga dibatasi oleh Kota Banda Aceh. Dari segi astronomis, Kabupaten Aceh Besar terletak pada posisi $5,2^{\circ}$ - $5,8^{\circ}$ LU dan 95° - $95,8^{\circ}$ BT.

Selain wilayah yang berbentuk daratan, Kabupaten Aceh Besar juga memiliki satu kecamatan yang merupakan sebuah kepulauan yaitu Kecamatan Pulo Aceh. Kecamatan ini terdiri atas lima buah

pulau, terdiri atas dua pulau besar dan tiga pulau kecil. Kelima pulau tersebut adalah Pulo Breuh, Pulo Nasi atau Pulau Dadap, Pulo Kelapa, Pulau Batee, dan Pulo Keurusa atau Pulo Keurusek. Luas wilayah Aceh Besar adalah 2.974,12 Km² atau 268.612 hektar. Luas wilayah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah pada tahun 1976 yaitu 302.900 ha. Penyebabnya¹ adalah pemisahan Banda Aceh dari Aceh Besar dan yang kemudian membentuk sebuah kota tersendiri sehingga luas wilayah Kabupaten Aceh Besar berkurang.

Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai luas wilayah, desa dan mukim menurut kecamatan di Kabupaten Aceh Besar tahun 1994 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

¹ Pemisahan wilayah antara Kabupaten Aceh Besar dengan Kot Banda Aceh terjadi setelah diresmikannya Kotamadya Banda Aceh pada tahun 1957 dengan didasarkan pada Undang-undang Darurat No. 8/1956 jo, Undang-undang No. 24/1956, jo Pasal 73 Undang-undang No. 1/1957. Dalam pemisahan itu beberapa wilayah Kabupaten Aceh Besar dimasukkan ke dalam wilayah Kotamadya Banda Aceh, yaitu Desa Blang Pineung (Kota Baru) dan Desa Lampriet (Bandar Baru).

Tabel 1
Luas wilayah, Jumlah desa, dan Mukim
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan	Luas (km ²)	Desa	Mukim
Lhoong	125,00	28	4
Lhoknga/Leupung	174,95	31	3
Indrapuri	530,50	85	5
Seulimeum	1.069,15	69	8
Mesjid Raya	110,38	13	2
Darussalam	114,18	42	5
Kuta Baro	92,42	54	6
Montasiek	130,00	53	4
Suka Makmur	197,00	68	7
Darul Imarah	49,15	46	5
Ingin Jaya	108,74	67	10
Peukan Bada	31,90	26	4
Pulo Aceh	240,75	17	3
J u m l a h	2.974,12	599	66

Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Aceh Besar tahun 1995.

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa selain desa yang sudah umum terdapat di seluruh wilayah Indonesia, juga terdapat *mukim* dengan jumlah sebanyak 66 buah. *Mukim* ini hanya terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, termasuk di Kabupaten Aceh Besar. Namun demikian, adanya *mukim* ini tidak membawa dampak pada batas antara desa yang satu dengan desa yang lainnya dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Sebagian besar desa-desa masih tetap mempertahankan batas desa yang telah dibuat sejak zaman kolonial

Belanda. Meskipun ada juga sebagian kecil desa yang merubah batas desanya namun hanyalah sebatas perubahan yang tidak berarti banyak terhadap kondisi luas wilayah desa tersebut.

2. Keadaan Alam dan Lingkungan Fisik

Dilihat dari segi topografi, kondisi tanah di Kabupaten Aceh Besar terdiri dari tiga jenis, yaitu tanah datar landai, tanah berbukit dan tanah pegunungan yang curam. Tanah datar landai terletak pada bagian sepanjang aliran sungai dan berada pada daerah pemukiman penduduk serta daerah persawahan. Selain itu, wilayah dataran landai juga membentang di sekitar daerah pesisir pantai yang berawa-rawa dan ditumbuhi oleh pohon nipah dan hutan payau/bakau (*mangrove*). Daerah topografi yang kedua adalah tanah berbukit/bergelombang kecil. Dataran ini terletak pada bagian tenggara dan lembah sungai. Tanah berbukit memiliki ketinggian antara 25-500 meter di atas permukaan laut. Permukaan tanah berbukit merupakan padang rumput dan hutan serta sebagian kecil adalah daerah pertanian dan pemukiman penduduk. Daerah topografi yang ketiga adalah tanah pegunungan yang curam yang terletak pada bagian selatan Kabupaten Aceh Besar dengan ketinggian antara 500-1.200 meter di atas permukaan laut.

Daerah yang memiliki bentuk topografi berupa dataran tinggi sebagian besar terletak pada bagian tengah Kabupaten Aceh Besar, sedangkan topografi berbentuk dataran rendah terletak pada wilayah bagian pesisir timur dan pesisir barat. Dataran tinggi ini merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang membujur dari arah barat laut ke tenggara dalam yang terbagi dalam dua bagian, yaitu bagian utara dan timur (pesisir utara dan timur) dan bagian barat dan selatan (pesisir barat dan selatan). Pegunungan Bukit Barisan rata-rata berada

pada ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut. Pegunungan Bukit Barisan ini termasuk dalam kategori gunung berapi dan gunung bongkakan.

Dataran tinggi yang berada pada bagian tengah Kabupaten Aceh Besar terdiri dari tiga buah gunung yaitu Gunung Paron, Gunung Seulawah Agam dan Gunung Geurutee. Gunung Geurutee ini mempunyai fungsi administratif, yaitu sebagai batas antara Daerah Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Jaya. Selain itu, Gunung Geurutee terkenal juga karena keadaan alamnya yang indah dan asri dan masih menyimpan beragam flora dan fauna.

Dari ketiga buah gunung tersebut keluar mata air yang membentuk beberapa sungai. Ada tiga buah sungai besar yang mengalir dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar. Ketiga sungai besar tersebut adalah Sungai Krueng Raya, Krueng Aceh dan Krueng Seulimum. Sungai Krueng Raya memiliki sumber mata air di daerah perbukitan di Kecamatan Mesjid Raya. Dua buah sungai yang lain, yaitu Krueng Seulimum dan Krueng Aceh, memiliki sumber mata air yang berasal dari Gunung Seulawah dan mengalir menuju ke daerah pesisir timur dan bermuara di Selat Malaka.

Debit air yang mengalir dari ketiga sungai tersebut masih dapat dikatakan cukup stabil karena curah hujan yang turun masih cukup memadai. Curuh hujan ini turun pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Pada bulan-bulan tersebut angin yang berhembus berasal dari arah barat. Oleh karena itu, musim hujan di daerah Kabupaten Aceh Besar disebut juga sebagai musim barat. Sedangkan untuk musim kemarau jatuh pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Arah angin yang berhembus berasal dari timur telah menyebabkan musim kemarau sering disebut juga sebagai musim angin timur.

Berdasarkan data Kantor statistik Aceh Besar tahun 1980, pada musim kemarau, kecepatan angin rata-rata berada pada 0,5 knot/jam. Kecepatan angin itu akan bertambah kencang pada permulaan dan selama musim penghujan. Pada tahun 1994, kecepatan angin bertambah kencang yang terjadi pada bulan Januari, Juni, Agustus dan September dengan rata-rata kecepatan angin berkisar antara 4 sampai dengan 5 knot per jam. Hari-hari hujan banyak terjadi pada bulan April, Mei, Oktober, November dan Maret dengan jumlah hari antara 8 sampai dengan 15 hari hujan per bulannya. Jumlah curah hujan/mm terjadi pada pada Bulan Maret (239,5 mm), April (140,8 mm), Mei (210,1 mm), Oktober (258,1 mm), dan Bulan November (172,8 mm).

Iklim di Kabupaten Aceh Besar termasuk dalam kategori iklim tropik dengan rata-rata suhu 28,1°C. Kondisi suhu maksimum adalah 31,20° C sedangkan untuk suhu minimum berkisar pada suhu 24,40° C. Sesuai dengan ciri-ciri iklim daerah tropik yang mempunyai tingkat kelembaban cukup tinggi, daerah Aceh Besar pun demikian halnya. Berdasarkan data statistik Kabupaten Aceh Besar tahun 1980, tingkat kelembaban relatif maksimum adalah 85 %.. Sedangkan untuk tingkat kelembaban relatif minimum adalah 59 %.. Dengan demikian, rata-rata tingkat kelembaban relatif di Aceh Besar adalah 71 %.. Namun pada tahun 1994 kelembaban tersebut cenderung meningkat sebagai akibat dampak dari pemanasan global yang terjadi di sebagian besar penjuru dunia yang disebabkan terbukanya lapisan ozon. Kelembaban nisbi rata-rata menjadi sekitar 77 %..

Menurut jenis tanah, wilayah Aceh besar terdiri dari sekitar enam jenis, yaitu tanah latosal, potsolit, benzona, aluvial, hydromorph, dan regosal. Tanah latosal terdapat di sekitar Gunung Seulawah Agam dan Seulawah Inong dan memiliki luas areal sebesar

16 persen dari luas daerah. Tanah Potsolit merah dan kuning berada pada ketinggian 10 sampai dengan 300 meter dari permukaan laut dengan luas areal adalah 71 persen dari luas daerah. Tanah Benzona yang berada di bukit barat merupakan tanah batu kapur dengan luas areal persen dari luas daerah. Tanah Aluvial, Hydromorph dan Regosal berada di daerah sekitar pantai dengan ketinggian antara 0-100 meter dari permukaan laut.

B. Keadaan Sosial Budaya

1. Penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 1971, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar adalah 181.579 jiwa. Sedangkan data statistik tahun 1980, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Besar adalah 236.254 jiwa. Dengan demikian, dalam jangka waktu 9 tahun tersebut pertumbuhan penduduk Aceh Besar sebanyak 2,5 persen pertahun. Pada tahun 1990, jumlah penduduk telah Omencapai 240.181 jiwa yang terdiri atas 121.297 laki-laki dan 118.884 perempuan. Laju pertambahan penduduk terus meningkat hingga penduduk di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1994 telah mencapai 257.645 jiwa, terdiri atas 128.590 laki-laki dan 129.055 perempuan.

Pertambahan jumlah penduduk yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar disebabkan oleh dua hal yaitu pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk yang disebabkan oleh migrasi. Pertambahan penduduk secara alami adalah akibat dari danya kelahiran penduduk setempat, sedangkan pertambahan penduduk karena migrasi disebabkan terutama oleh kedatangan para transmigran. Sebagian besar para transmigran yang datang dan menetap di Kabupaten Aceh Besar berasal dari Pulau Jawa. Mereka

bertempat tinggal di dataran tinggi Saree, yang berada di wilayah Kecamatan Seulimum.

Penyebab pertambahan penduduk lainnya karena kedatangan WNA yang tinggal sementara di wilayah Aceh Besar, namun sudah dicatat oleh aparat pemerintah setempat. Data Statistik tahun 1993 menunjukkan jumlah WNA tersebut sekitar 83 orang. Dari jumlah tersebut, 78 di antaranya adalah warga negara Cina. Jumlah penduduk Aceh Besar berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Distribusi Penduduk Aceh Besar
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 - 4	14.907	14.579	29.486
5 - 9	16.951	16.478	33.429
10 - 14	15.938	15.407	31.345
15 - 19	14.870	15.070	29.940
20 - 24	11.847	13.409	25.256
25 - 29	10.629	11.084	21.713
30 - 34	8.637	8.525	17.162
35 - 39	7.730	7.191	14.921
40 - 44	6.024	5.511	11.535
45 - 49	5.276	4.998	10.274
50 - 54	4.588	4.871	9.459
55 - 59	2.930	3.038	5.968
60 - 64	3.369	3.420	6.789
65 - 69	2.167	1.962	4.129
70 - 74	1.575	1.893	3.468
> 75	1.152	1.619	2.771
J u m l a h	128.590	129.055	257.645

Sumber: Kantor Statistik Kabupaten Aceh Besar, 1995

Dari tabel 2 tampak bahwa jumlah penduduk kelompok umur Balita (0 - 4 tahun) termasuk cukup banyak (29.486 jiwa) dan jumlah penduduk kelompok umur > 75 tahun termasuk sedikit (2.771 jiwa). Artinya, jumlah penduduk semakin sedikit seiring dengan semakin bertambah usia. Hal ini memberi gambaran piramida penduduk Aceh besar adalah piramida penduduk Muda. Dengan melihat gambaran piramida penduduk tersebut, maka dapat dikatakan bahwa angka kelahiran di Kabupaten Aceh Besar cenderung masih tinggi. Kecenderungan ini disebabkan masih sedikitnya peserta KB (29.950 peserta dari 54.013 rumah tangga), meskipun target yang ditetapkan pada tahun 1994/1995 yaitu 25.670 peserta KB (116,67 persen).

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa para pendatang yang sebagian besar adalah para transmigran yang berasal dari etnis Jawa dan ada sebagian kecil yang beretnis Cina, sedangkan para penduduk asli Aceh Besar adalah dari etnis Aceh. Etnis Aceh ini ternyata tidak hanya bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar saja, tetapi juga di kabupaten lainnya seperti Kabupaten Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Barat. Etnis Aceh juga mendiami wilayah Kotamadya Banda Aceh dan Kotamadya Sabang. Dengan demikian, Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh dihuni tak kurang dari 60-85 persen etnis Aceh.

2. Mata Pencaharian

Sumber mata pencaharian utama warga Aceh Besar adalah sektor pertanian. Adapun jumlah desa yang menggunakan lahannya untuk bertani tercatat 561 buah desa. Jenis pertanian yang mereka usahakan adalah pertanian tanaman pangan. Sedangkan desa lainnya menggunakan sebagian lahannya untuk peternakan dan perkebunan (7 buah desa).

Luas keseluruhan lahan pertanian di Aceh Besar pada tahun 1994 adalah 30.421 hektar atau kurang lebih 10 persen wilayah keseluruhan Aceh Besar. Oleh karena penggunaan lahan yang sangat luas tersebut, berdasarkan data statistik tahun 1995 tercatat tenaga yang tertampung dalam bidang pertanian ini sekitar 80.382 orang. Jumlah keseluruhan lapangan pekerjaan menampung 99.953 orang tenaga kerja. Jadi, dapat dikatakan bahwa sektor pertanian menampung 80 persen tenaga kerja.

Sistem pengairan pertanian di Kabupaten Aceh Besar diperoleh melalui dua cara, yaitu sistem irigasi dan sistem tadah hujan. Air sistem irigasi ini bersumber dari sungai Krueng Aceh dan Krueng Seulimum. Sistem irigasi di Aceh Besar ini mampu mengairi persawahan seluas 9.869 hektar. Sistem tadah hujan dimanfaatkan oleh para petani dengan luas lahan sawah tadah hujan sebanyak 20.552 hektar. Jenis pengairan ini terutama terdapat pada desa-desa tidak dapat dijangkau oleh sarana irigasi.

Desa yang sebagian besar penduduknya mengandalkan lahannya sebagai tempat untuk memelihara ternak di Kabupaten Aceh Besar hanya berjumlah satu buah desa. Jenis ternak yang mereka pelihara adalah sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba. Untuk jenis unggas mereka banyak memelihara ayam ras petelor/pedaging, ayam buras, dan itik.

Desa yang terletak di pinggir pantai biasa penduduknya lebih mengutamakan penggunaan lahan pada sektor perikanan darat (16 buah Desa). Mereka melakukan pembudidayaan ikan dan udang. Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1994 telah menghasilkan 9.145,40 ton ikan laut, sedangkan perikanan darat dengan lahan pertambakan seluas 127,75 hektar hanya mampu menghasilkan panen ikan sebanyak 509,70 ton.

Sarana untuk menangkap ikan yang utama dalam hal ini adalah perahu. Armada perahu penangkap ikan di Kabupaten Aceh Besar didominasi oleh perahu besar (26 buah). Jumlah ini wajar jika dilihat dari kondisi kelautan yang berombak besar karena letak Kabupaten Aceh Besar berada pada pertemuan antara Samudera Indonesia dan Selat Sumatera dengan Samudera Hindia, sehingga diperlukan jenis perahu yang cukup kuat untuk mengarungi lautan. Di samping perahu besar, ada juga warga Aceh Besar yang memiliki perahu kecil (9 buah), dan Jukung (11 buah) yang digunakan untuk mencari Ikan di sekitar pantai.

Selain pekerjaan pada sektor pertanian dan perikanan, sebagian warga Aceh bekerja pada sektor kerajinan tangan dan sektor lain yang mendukungnya. Keterkaitan jenis usaha ini dapat dilihat pada warga Desa Lamtamot di Kecamatan Darussalam yang mampu memanfaatkan lahannya yang cukup subur untuk ditanami jenis tanaman yang amat disukai oleh kupu-kupu penghasil ulat sutera. Usaha jenis ini makin lama makin berkembang sehingga Desa Lamtamot dikenal sebagai desa penghasil kepompong ulat sutera. Kepompong ini kemudian dimanfaatkan oleh desa tetangganya yaitu Desa Siem (masih berada dalam wilayah Kecamatan Darussalam) untuk membuat berbagai jenis tenunan sutera yang indah.

Jenis kerajinan tangan lain juga terdapat di Desa Baet Kecamatan Sukamakmur. Mereka membuat jenis senjata Rencong. Sedangkan untuk membuat sarung dan gagangnya, mereka memakai gading gajah yang didatangkan dari Sumatera Utara, kayu Kemuning, dan tanduk kerbau.

Di Kecamatan Lhoknga/Leupung terdapat pengrajin rotan. Mereka mampu menciptakan berbagai bentuk peralatan rumah tangga seperti keranjang buah, seperangkat meja kursi, lemari, dan lain-lain.

Pemasarannya dilakukan di pinggir jalan dengan cara membangun kios-kios ataupun dapat pula dipasarkan di Pasar Aceh (Kota Banda Aceh). Di samping itu, jenis mata pencaharian lainnya dalam wilayah Kecamatan Lhoknga/Leupung adalah dalam hal pembuatan alat untuk menangkap ikan.

Usaha kerajinan tangan tersebut berperan penting dalam kemajuan perekonomian Aceh Besar karena usaha mereka secara tidak langsung turut mengembangkan sektor perindustrian, baik dalam skala kecil, sedang maupun besar. Selain industri kerajinan tangan, Jumlah industri dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1994/1995 telah mencapai 1.085 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja mencapai 4.774 orang. Jumlah unit usaha ini oleh Pemda Aceh Besar diharapkan terus meningkat perkembangannya agar dapat menampung 100.200 orang angkatan kerja.

3. Pendidikan

Salah satu ukuran kemajuan daerah dapat dilihat dari pendidikannya. Sehubungan dengan hal tersebut pendidikan di daerah penelitian dapat dikatakan cukup maju. Pemerintah Kabupaten Dati II Aceh Besar telah membangun berbagai sarana pendidikan demi kemajuan pendidikan di daerahnya. Saat ini Kabupaten Aceh Besar telah memiliki sarana pendidikan dari tingkat SD (214 buah), SLTP (35 buah), dan SMU/SMK (17 buah). Kabupaten Aceh Besar juga telah memiliki sarana pendidikan agama (khususnya agama Islam) yaitu Madrasah Ibtidaiyah (49 buah), Madrasah Tsanawiyah (14 buah), dan Madrasah Aliyah (9 buah).

Sarana pendidikan tersebut telah dimanfaatkan oleh sebagian besar anak usia sekolah. Namun demikian, ada pula beberapa warga masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan berbagai sarana pendidikan

tersebut karena terbatasnya dana yang mereka punyai untuk menyekolahkan anaknya. Bagi orang tua yang kurang mampu untuk membayar biaya sekolah bukan berarti tidak dapat memperoleh pendidikan. Salah satu sarana pendidikan pra sekolah yang dapat dimanfaatkan oleh anak usia prasekolah adalah tempat pengajian yang diadakan di *meunasah-meunasah*. Sarana pendidikan ini sudah lama ada dan telah menjadi suatu kebiasaan bagi para orangtua untuk membawa anak mereka pada usia 4 - 6 tahun ke tempat pengajian guna memperoleh pendidikan dalam bidang agama Islam. Oleh karena itu, rata-rata usia anak-anak untuk memasuki SD di Kabupaten Aceh Besar adalah pada usia 7 tahun.

Bagi para orang tua yang memiliki penghasilan cukup tentunya mempunyai kesempatan untuk menyekolahkan anaknya lebih besar. Bahkan ada di antara mereka yang menyekolahkan anaknya ke kota. Selain itu, anaknya juga diharapkan dapat lebih mandiri arena harus menempuh pendidikan di tempat yang jauh dari lokasi tempat tinggalnya. Biasanya, mereka bersekolah di kota pada jenjang pendidikan setingkat SLTA sampai dengan perguruan tinggi. Akan tetapi, bagi mereka yang bertempat tinggal di Kecamatan Kuta Baro dapat memasuki Universitas Abulyatama, (sebagai satu-satunya universitas di Kecamatan Kuta Baro) sebagai tempat untuk memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bagi warga Aceh Besar, kesempatan untuk meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi dapat juga memasuki Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar-Raniry yang terletak di kecamatan Darussalam.

Sarana transportasi yang mudah dan strategis juga turut menentukan dalam memilih lokasi pendidikan seperti yang terdapat pada Gampong Pantee dan Gampong Bineh Blang di Kecamatan Ingin Jaya. Dua buah *gampong* tersebut mempunyai letak yang

bersisian dengan Kotamadya Banda Aceh sehingga banyak para pelajar yang bersekolah di Kotamadya Banda Aceh. Hal yang sama juga dirasakan para pelajar pada Gampong Pulot yang letaknya bersisian dengan ibukota Kecamatan Lhoknga/Leupung.

4. Sistem Religi

Sebagai daerah istimewa, Aceh memiliki keistimewaan dalam oleh tiga hal, yaitu adat, pendidikan, dan agama. Dalam bidang agama, Provinsi Daerah Istimewa Aceh dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah (Aceh: *Seuramoe Mekkah*) karena perkembangan agama Islam yang cukup menonjol di daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Karenanya, pengaruh agama Islam juga dirasakan pula oleh warga di Kabupaten Aceh Besar dalam kehidupan sehari-hari.

Di Kabupaten Aceh Besar, pendidikan agama Islam sudah diberikan sejak anak usia prasekolah. Sejak anak berumur 4-6 tahun, para orang tua mulai mengajarkan kepada anaknya tentang agama Islam dengan harapan agar setelah dewasa nanti akan menjadi orang yang taat dalam menjalankan syariat agama Islam. Apabila orang tua tidak mempunyai waktu yang cukup, maka mereka dapat menyerahkan pendidikan agama tersebut pada seorang *Teungku Meunasah*. Hal tersebut memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat di daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (termasuk Kabupaten Aceh Besar) bahwa untuk mendidik agama Islam pada anak, para orang tua membawa mereka ke *Teungku Meunasah*.

Dalam memberikan mata pelajaran, *Teungku Meunasah* dibantu oleh beberapa orang. Jam pelajaran dapat dimulai pada waktu malam hari sehabis Sholat Maghrib, sehabis Sholat Ashar, atau dapat juga diberikan pada pagi hari yaitu selepas Sholat Subuh. Metode pengajaran yang diberikan adalah metode *Halaqah* yang terbagi

dalam tiga tingkatan yaitu membaca, menghafal, dan menerjemah. Kegiatan belajar mengajar berlangsung setiap hari, kecuali hari Jum'at. Pada hari tersebut para murid (Aceh : *Murib*) melakukan kegiatan kesenian yang bernafaskan Islam seperti qasidah dan nyanyian puji-pujian. Selain itu, bagi mereka yang sudah berada pada tingkat menerjemah atau tingkat akhir, mereka akan mengadakan acara *Meurukon* yaitu semacam diskusi untuk membahas masalah-masalah agama.

Selain ada pula metode pengajaran yang disesuaikan dengan tempat pengajaran. Tingkat rendah, yang diisi oleh murid-murid berusia prasekolah, bertempat di *meunasah*. Apabila ingin melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, maka mereka akan pergi ke mesjid untuk belajar dan secara otomatis mereka juga harus mendiami *Rangkang*, yaitu sebuah perumahan kecil dan sederhana yang dibangun di secara bergotong royong oleh warga *Gampong* yang termasuk dalam wilayah sebuah mukim dengan lokasi bangunan berada di samping mesjid. Kegunaan *Rangkang* ini adalah sebagai sarana penginapan para murid selama masa pengajaran berlangsung. Pengajar dalam sebuah *Rangkang* adalah *Teungku Rangkang* yang dibantu oleh beberapa muridnya yang telah berpengalaman dalam memberikan pengajaran.

Tingkat selanjutnya setelah masa belajar di *Rangkang* selesai adalah melanjutkan ke tempat pendidikan yang bernama *Dayah*, karena *Dayah* merupakan tingkat pendidikan yang tertinggi, para pengajarnya adalah orang yang telah ahli. Mereka biasa disebut sebagai *Teungku Chiek*. Jumlah *Dayah* biasanya lebih kecil dari jumlah *Rangkang* sehingga bagi mereka yang ingin menuntut ilmu (Aceh: *Eleume*) di *Dayah*, mereka harus pergi jauh dari lokasi tempat

tinggalnya karena *Dayah* biasanya jarang didirikan pada setiap *Mukim*. Salah satu *Dayah* yang cukup terkenal di Kabupaten Aceh Besar hingga sekarang adalah Dayah Teungku Chik Tanoh Abee yang memiliki bangunan cukup besar dan dilengkapi sebuah perpustakaan yang berisi koleksi buku tentang keislaman.

Sebutan *Dayah* pada saat sekarang ini di Kabupaten Aceh Besar mulai kurang dikenal. Sebutan baru untuk *Dayah* adalah pesantren. Bagi Pesantren yang masih menganut sistem pendidikan tradisional, para muridnya akan diajarkan sebagian besar hanyalah pendidikan agama Islam saja. Namun lain lagi halnya pendidikan pesantren dengan sistem terpadu, yaitu pendidikan yang memadukan antara ilmu agama dengan ilmu duniawi. Pola pesantren terpadu baru diterapkan penggunaannya pada beberapa tahun belakangan ini sehingga perbandingan antara jumlah pesantren tradisional di Kabupaten Aceh Besar lebih menonjol (35 buah) jika dibandingkan dengan pesantren dengan sistem pola terpadu/pesantren modern (5 buah).

Secara umum pengetahuan tentang Islam yang banyak diajarkan di setiap pesantren di Aceh termasuk Aceh Besar menganut mazhab Syafi'e. Mazhab ini mulai diajarkan oleh para Teungku kepada muridnya sejak dini. Apabila mereka telah dianggap mampu menguasai ilmu yang diajarkan oleh Teungku mereka, maka pilihan selanjutnya guna lebih memperdalam pengetahuan tentang agama Islam adalah dengan cara belajar Tasawwuf (Aceh: *Teusawoh*) atau paham Sufi yang terdiri dari beberapa aliran seperti aliran Syattariyah dan aliran Naqshabandiyah. Tasawwuf biasanya diajarkan di *Dayah-dayah*/pesantren di Kabupaten Aceh Besar.

Tasawwuf serta pengetahuan keislaman lainnya tersebut tentu tidak dikuasai oleh orang Aceh secara keseluruhan. Ada juga di antara

mereka yang sangat minim pengetahuan keislamannya. Namun demikian bukan berarti membuat faktor keislamannya menjadi berkurang. Mereka akan sangat tersinggung apabila disebut kafir (Aceh: *Kaphe*). Bagi Orang Aceh, penyebutan yang demikian hanya akan mengundang kemarahan dan pertengkaran. Islam dan adat istiadat sudah dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana terungkap dalam ungkapan Aceh yang sudah sangat populer, yaitu "*Adat ngon hukum hanjeut cree lagee zat ngon sifeut*", artinya adat dengan hukum syariat Islam tidak dapat dipisahkan seperti unsur dengan sifatnya. Dengan ungkapan tersebut maka dapat dikatakan bahwa meskipun Islam sudah menjadi pegangan hidup orang Aceh, kehidupan keseharian masyarakat Aceh tidaklah sepenuhnya menerapkan ajaran Islam karena segi budaya Aceh pun juga turut menentukan.

Dalam perjalanan kehidupan beragama, Islam bukanlah agama satu-satunya yang masuk di Aceh. Sebelum Islam datang dan berkembang, agama lain telah datang terlebih dahulu yaitu agama Hindu. Di Kabupaten Aceh Besar, para penduduk Hindu Purba menetap di Tanoh Abee, Panca dan Jantho setelah terlebih dahulu menyusuri daerah-daerah pesisir hingga terus ke daerah pedalaman Aceh Besar. Mereka hidup berdampingan dan mempunyai hak serta kewajiban yang sama dengan penduduk setempat. Keadaan tersebut lambat laun menimbulkan perpaduan antara kebudayaan Aceh dengan kebudayaan Hindu.

Setelah agama Islam berkembang, kebudayaan atau adat istiadat yang telah ada sebelumnya kemudian berpadu pula dengan kebudayaan Islam. Dengan demikian, muncul muncul kepercayaan akan adanya makhluk gaib yang menghuni dunia. Mereka percaya bahwa terdapat dua golongan makhluk gaib, yang pertama adalah makhluk gaib yang semata-mata mengabdikan dirinya kepada Tuhan

Yang Maha Kuasa, sedangkan yang kedua adalah makhluk gaib yang memiliki sifat jahat dan selalu menggoda manusia agar memilih jalan yang sesat dalam hidupnya.

Karenanya, sistem religi yang ada di Kabupaten Aceh Besar ada pula yang mengandung arti permohonan agar keinginannya tercapai. Permohonan seperti ini diistilahkan sebagai *meukaoy* atau bernazar. Apabila keinginannya telah dikabulkan, maka akan diadakan *peulheuh kaoy* yaitu upacara melepaskan nazar pada tempat di saat mereka melaksanakan *kaoy*. Permohonan lainnya adalah bersifat permanen, artinya, mereka menghendaki agar dirinya dibekali kesaktian sehingga mereka mudah dalam menjalani kehidupan. Untuk mendapatkannya, mereka harus memenuhi beberapa syarat sebagai konsekuensi dari permintaan mereka. Bentuk dari kesaktian yang mereka peroleh - setelah melaksanakan syarat-syarat - adalah berupa suatu benda yang lazim disebut azimat. Namun setelah seseorang mendapatkan azimat, mereka juga diharuskan untuk mentaati berbagai macam pantangan agar azimat itu tidak hilang kesaktiannya.

Bentuk lain dari sistem religi orang Aceh yaitu kepercayaan mengenai keberadaan kekuatan alam dan keberadaan makhluk halus. Bentuk kepercayaan tersebut diyakini berasal dari sejak zaman pra Islam dan beberapa di antaranya masih dipercaya sampai saat sekarang ini. Beberapa contoh yang dapat diuraikan adalah berkisar pada gejala alam seperti gempa bumi dan petir di siang hari tanpa disertai mendung atau hujan pada masyarakat Aceh Besar menandakan akan terjadi perubahan dalam susunan wilayah. Bunyi guruh dari arah lautan (Aceh: *Taga Laut*) mengisyaratkan akan adanya ikan dalam jumlah besar karena mereka percaya bahwa ikan takut guntur hingga akan berenang ke tepi pantai. Munculnya Pelangi (Aceh: *Bulan raja timoh*) pertanda musim kemarau akan tiba.

Masyarakat Aceh percaya bahwa makhluk halus itu ada di sekitar mereka dan bermukim di tempat yang dianggap angker seperti kuburan, rawa-rawa, hutan belantara dan sungai. Para makhluk halus adalmuncul pada saat matahari mulai terbenam sehingga banyak orang tua yang melarang anaknya agar jangan keluar pada saat seperti itu karena dikhawatirkan para makhluk halus akan menyembunyikan atau hinggap pada diri anaknya. Untuk mengusir makhluk halus tersebut, maka warga Aceh Besar melakukan upacara tertentu. Selain itu, agar makhluk halus jangan hinggap ke diri mereka, maka ada beberapa pantangan yang harus dipatuhinya seperti dilarang berbicara yang tidak baik bila berada dekat dengan kuburan angker, dan lain-lain. Upacara keagamaan juga masih diterapkan oleh warga Aceh Besar terutama upacara yang berkaitan dengan siklus hidup seseorang yakni semenjak bayi dalam kandungan sampai meninggal.

BAB III

LEMBAGA PENDIDIKAN DAYAH DI ACEH

A. Sistem Pendidikan Sebelum Revolusi Kemerdekaan

1. Sistem Pendidikan Pada Masa Kesultanan

Penjelasan C. Snouck Hurgronje dalam bukunya *Aceh Di mata Kolonialis*, memberikan indikasi bahwa lembaga-lembaga pendidikan memang sejak dahulu telah hidup dan berkembang di Aceh. C. Snouck Hurgronje menulis bahwa awal dari semua pengajaran bagi setiap pengikut nabinya yang terdidik adalah pengajian Al-quran (*Aceh: beuet kuruan*). Diawali dengan lafal bacaan bahasa Arab, dengan memberikan praktek langsung melalui pendengaran, ingatan dan ucapan lidah dengan mengindahkan aturan bacaan yang disebut dengan *ilmu tajwid*. Umumnya sistem pendidikan yang dikembangkan melalui pusat-pusat pengajian di *meunasah* atau rumah-rumah, tetapi kemudian berkembang, sehingga lembaga-lembaga pendidikan itu tumbuh di *rangkang-rangkang*, yaitu suatu bangunan sederhana semacam pondok-pondok kecil yang dibangun dari rangka kayu beratap rumbia dan berdinding papan atau yang beratap daun nipah berdinding bambu.

Pendidikan dasar yang dilaksanakan di *meunasah* pada setiap kampung untuk anak laki-laki, gurunya adalah *teungku imeum* dengan dibantu oleh satu sampai dua orang guru lainnya, sesuai dengan kebutuhan. Untuk anak perempuan, dilaksanakan di rumah *teungku imeum* dengan istrinya sebagai guru yang disebut *teungku di rumoh*.

Mula-mula diajarkan, baik di rumah maupun di *meunasah*, ialah membaca Al-quran, untuk itu yang dimulai dengan memperkenalkan huruf alfabet Arab, seperti yang tercantum dalam kaidah Baghdadiah. Setelah selesai pengajian berpindah kepada Juz Amma.

Sebagian besar dari *teungku imeum meunasah*, selain dari mengajarkan Al-quran, juga mengajarkan kitab-kitab Jawoe, yaitu kitab bahasa Melayu dengan tulisan Arab, yang masih tingkat rendah, seperti *Masailal muhtadi* yang memakai sistem tanya jawab. Dimulai dari masalah tauhid, kemudian sedikit mengenai hukum yang berhubungan dengan shalat, puasa, dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan mempelajari kitab-kitab yang lebih tinggi, seperti *Bidayah, Miftahul Jannah, Sirath Sabilah Muhtadin, Kitab Delapan Dan Majmu'*. Semua kitab itu ditulis dalam bahasa Melayu dengan tulisan Arab, tetapi di Aceh terkenal dengan kitab *Jawoe*. Meskipun sebenarnya kitab-kitab itu sudah cukup luas pembahasannya mengenai hukum-hukum Mazhab Syafi'i, namun orang-orang yang hanya dapat membaca kitab-kitab itu saja, nilainya kurang, dibandingkan dengan ulama yang disebut *malem nahu*. Sedangkan yang pertama tadi disebut *malem Jawoe*. Oleh karena itu, kebanyakan orang memilih mempelajari kitab *nahu*. Kitab *nahu* itu adalah kitab-kitab yang berbahasa Arab. Meskipun arti *nahu* itu sendiri adalah tata bahasa. Dinamakan kitab-kitab itu dengan kitab *nahu*, karena orang tidak dapat membacanya kalau mereka belum pandai *nahu*. Pelajaran semacam ini tidak diajarkan di *meunasah*, melainkan di *dayah*. *Dayah* itu biasanya dekat mesjid, meskipun ada juga dekat rumah *teungku* yang punya *dayah* itu sendiri, terutama *dayah* yang tingkat pelajarannya sudah tinggi. Oleh karena itu, orang yang belajar ilmu *nahu* itu tidak dapat belajar secara sambilan. Untuk itu mereka harus memilih *dayah* yang jauh dari kampungnya dan tinggal di *dayah* itu. Cara seperti ini disebut *meudagang*. Di *dayah* itu sudah

disediakan pondok-pondok kecil yang disebut dengan *rangkang*. *Rangkang* ini merupakan rumah panggung kecil yang memuat dua orang tiap rumah, atau merupakan rumah panjang yang dibagi dalam beberapa bilik, yang tiap bilik ditempati oleh dua orang. Mereka masak sendiri, ber-kongsi dua atau empat orang, mencari kayu api sendiri, berbelanja sendiri, menyuci sendiri, pokoknya semua pekerjaan dilakukan sendiri. Waktu-waktu luang digunakan untuk menanam sayur-sayuran dan sebagainya. Kadang-kadang juga membantu *teungku* di *bale* untuk memotong padi yang sudah masak di sawah dan sebagainya. Oleh karena itu, kebanyakan mereka sudah dibiasakan hidup mandiri (Ismuha, 1983: 20).

Pelajaran dimulai dengan *sharaf* (perubahan kata), karena satu kata dapat berubah menjadi beberapa kata, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah disusun rapi dan menghafalnya sekaligus. *Sharaf* ini diperlukan untuk mengetahui asal kata supaya dapat mempergunakan kamus. Setelah itu dilanjutkan dengan mempelajari *nahu*, yang dimulai dengan kitab *Ajrumiyah*, kemudian *Mukhtashar*, *Mutammimah* dan akhirnya *Alfiyah*. *Nahu* ini diperlukan untuk dapat membaca huruf akhir, baik dari kata benda maupun kata kerja. Sesudah itu baru diajarkan kitab-kitab fiqh yang membicarakan hukum, dimulai dengan *Safinatun naja*, *Matan Taqrib* kemudian *Fathu al-qarib*, *Fathu al-muin*, *Tahrir*, *Iqna*, *Fathu al-wahab*, *Mahally*, *Tuhfan* dan *Nihayah*. Setelah itu baru diajarkan tafsir Al-quran dan Hadist.

Caranya memberi pelajaran, *teungku* membaca dan para santri mendengar. Sesudah dibaca, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu lama dan kadang-kadang dalam bahasa Aceh. Untuk membantu para pelajar mengetahui kedudukan tiap kata dalam kalimat, ditentukan cara menerjemahkannya. Pelajar yang sudah tinggi diberikan sendiri

oleh *teungku di balee*, sedangkan yang masih rendah diserahkan kepada *teungku di rangkang*. *Teungku di rangkang* dipilih di antara para santri yang sudah tinggi dan cakap. Hal ini merupakan cara praktik bagi santri itu sendiri, sehingga sesudah selesai pelajarannya nanti dengan mudah dapat mengajar, kalau mereka mau mendirikan *dayah* sendiri di kampungnya. Mengenai selesai tidaknya seorang santri, tidak ditentukan oleh jumlah tahun mereka belajar, melainkan oleh mampu tidaknya seseorang menguasai kitab-kitab yang telah dipelajarinya. Yang mengetahui hal-hal itu adalah *teungku di balee*. Oleh karena itu, orang dapat memperhatikan siapa-siapa yang ditunjuk menjadi *teungku di rangkang*, dan apabila *tengku di balee* berhalangan untuk mewakilinya. Ijazah hanya diucapkan dengan lisan, yang mengatakan bahwa *teungku* telah mengijazahkan ilmu yang telah dipelajarinya dari *teungku* (Ismuha, 1983: 22).

Sepanjang sejarah, dapat diketahui bahwa pusat pendidikan di Aceh tidak tetap pada satu tempat, melainkan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pada Kerajaan Islam Peureulak, pusat pendidikan Islam ialah Dayah Cot Kala, kira-kira dekat Bayeuen (Aceh Timur). Pendirinya adalah Teungku Chiek Muhammad Amin pada awal abad X. Pada masa Kerajaan Islam Lingga (Aceh Tengah), terdapat pula pusat pendidikan yang terkenal dengan *Dayah Seuruleu*. Sesudah Kerajaan Indra Purba (Aceh Besar) menjadi kerajaan Islam dengan nama kerajaan Islam Darussalam, didirikan pusat pendidikan Islam dengan nama *Dayah Lam Keuneu'eun* di bawah pimpinan Syekh Abdullah Kan'an yang kemudian terkenal dengan Teungku Chiek Lam Keuneu'eun. Sesudah Aceh menjadi satu kerajaan Islam yang berpusat di Banda Aceh Darussalam, maka pusat pendidikan pun berpindah ke pusat Kerajaan Banda Aceh dengan didirikannya Jamiah Baiturrahman (Hasjmi, 1975: 8-9).

Dari segi tugasnya ulama Aceh terdiri dari pertama, *teungku meunasah*, bertugas memimpin dan mengajarkan anak-anak tingkat pemula di *meunasah* di samping mengurus perkara atau kepentingan masyarakat di kampung. Pelajarannya adalah tulis baca huruf *Jawoe* (tulisan Arab berbahasa Melayu), Juz Amma, doa dan praktek-praktek shalat dan keyakinan-keyakinan dalam Islam. kitab-kitab yang biasa diajarkan tentang keyakinan untuk tingkat ini adalah *Masailal Muhtadi Li Ikhwanil Muhtadi* karangan Teungku Chiek di Leupeu (Daud Arrumi). Kitab yang mengenai hukum Islam adalah *Bidayah Hidayah*, karangan Muhammad Zain bin Jalaluddin. Pada sebagian *meunasah*, sesuai dengan kemampuan *teungku* ada yang diajarkan dasar-dasar bahasa Arab. Kedua, *teungku* di *rangkang*, mengajar murid-murid tamatan *meunasah*. Ali Hasyimi dalam *Sinar Darussalam* no. 62 tahun 1975 menjelaskan bahwa *meunasah* dari segi pendidikan kira-kira sama dengan SD sekarang, *rangkang* sama dengan SMP, *dayah* sama dengan SMA, *bale* sama dengan akademi, sedangkan perguruan tinggi berada di Jami'ah Baiturrahman Banda Aceh. Akan tetapi, dalam versi lain ada sedikit perbedaan seperti hasil penelitian Baihaqi bahwa *rangkang* adalah pendidikan tingkat menengah dan lanjutan, sedangkan *bale* adalah pendidikan tinggi. *Rangkang* dan *balee* berkumpul dalam satu kompleks yang diberi nama *dayah* yang dipimpin oleh seorang *teungku* di *balee*, kemungkinan ada di antara *balee* itu yang dapat disamakan dengan akademi. Di tingkat *rangkang* semua kitab-kitab pelajaran dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah *Tahrirul aqwal*, *matan ajrumiyah*, *matan muttammimah*, *sharaf* : *matan bina salul mudkhal*, *alkailani* dan *almakluk*, fikih: *matan taqrieib*, *fathu qarieb*, *al bajuri*, *fathul muin* dan *l'anatut thalibien*. tauhid : *matan as-sanusi*, *kifayatul Awam* dan *Hudhudi*, Ushul fiqh ; *al-waraqat*, *lathaiful isyarah* dan *ghayatul wushul*. *Al-balaghah*: *Majmu' khamsir Rassail*, dan *Al-Bayan*.

Tasawuf/akhlak : *Maraqih al-ubudiyah*, *Tanbih al-ghafilin* dan kitab-kitab lain yang ditetapkan oleh *teungku*. Semua kitab itu dipelajari menurut urutan yang tetap. Setelah tamat dan mengerti yang satu barulah pindah kepada yang lainnya (kadang-kadang banyak murid yang menjadi pendengar pada pelajaran yang lebih tinggi). Jangka waktu belajar tidak ditetapkan dengan tahun, tetapi didasarkan pada tamatnya kitab-kitab yang dipelajari. *Ketiga*, *teungku* di *balee* (lama kelamaan menjadi *teungku chiek*), mengajar di *balee* yang dikelilingi oleh *ranggang-ranggang*. Secara berangsur dalam jangka waktu sesuai dengan kemampuan menamatkan kitab yang telah ditentukan (ada yang lebih 10 tahun) *murib* di *ranggang* menjadi *murib* di *balee*. Mereka inilah yang diangkat oleh *teungku* di *balee* menjadi guru-guru bantu yang mengajar di *ranggang* dan sejak itu mereka diberi gelar *teungku* di *ranggang* (guru pendidikan menengah). Tingkat pendidikan ini juga tidak dapat ditentukan berapa tahun seorang *murib* harus belajar di *balee* sebab selesainya tergantung kepada kemampuan menamatkan kitab yang telah ditentukan. Walaupun demikian, sesuai dengan pengetahuan *teungku* di *balee*, ada juga murid yang dapat menyelesaikan pelajarannya dalam jangka waktu 5 tahun.

Di antara mata pelajaran yang diajarkan adalah nahu: *alfiah* dan *khudri*. Sharaf: *Mirahul Arwah*. Fiqh : *Al-mahalli* dan *Fathul wahab*. Tau-hid : *Ad-dasuqi*. Usul fiqh : *Jam'ul Jawani*. Mantiq : *Isaghuji*, *as-shabban* dan *as-syamsiah*. Al balaghah : *Jawahir almaknum*. Tasauf atau akhlak : *Ihya Ulumuddin* dan kitab-kitab lain yang ditetapkan oleh *teungku* di *balee*. Murid-murid keluaran *balee* sudah diberi gelar *teungku*, karena dia telah mendapatkan kepercayaan untuk mendirikan *dayah* sendiri. *keempat*, *teungku chiek* (*dayahnya* bernama *dayah teungku chiek*) adalah ulama besar dan

tokoh yang di samping masih mengajar disebuah atau memimpin beberapa buah *balee* juga sudah banyak jasanya kepada rakyat. Belajar dengan *teungku chiek* adalah merupakan pendalaman berbagai ilmu agama atau lainnya. Oleh karena itu, metode belajarnya lebih mendekati diskusi, debat, bertukar pikiran dan tidak lagi hanya terikat dengan satu kitab sebagai pegangan. Dengan cara demikian, murid-murid mempelajari kitab-kitab besar mengenai hukum Islam, hadist, tasawuf, tafsir kitab-kitab besar atau pengetahuan khusus lainnya secara mendalam. Ada di antara murid yang mendalami sesuatu bidang di antara ilmu itu. Dalam perdebatan *teungku chiek* bertindak sebagai moderator, pendapatnya dalam masalah-masalah yang rumit sangat menentukan. Metode yang demikian mendorong murid-murid untuk membaca dan mendalami secara teliti sekian banyak buku-buku yang berhubungan dengan ilmu yang sedang dipelajarinya (Baihaqi, 1983: 158-161).

Di samping itu, sesuai dengan keahlian *teungku chiek* diajarkan pula vak tertentu mengenai sesuatu bidang ilmu pengetahuan umum. Di antara mereka ada yang ahli dalam ilmu falak, dan yang lain menonjol dalam ilmu hisab, dan ada yang pintar dalam ilmu kedokteran, di samping ada juga yang cakap dalam ilmu bangunan, pertanian dan lain sebagainya. Untuk memperdalam vak-vak khusus itulah sebagian *teungku* di *balee* belajar kepada *teungku chiek*, dan para *teungku chiek* pada umumnya memperoleh keahlian itu di luar negeri seperti Mekkah, Mesir, Turki, India dan lain-lain (Baihaqi, 1983: 160).

Dalam sejarah awal perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam, istilah *zawiyah* memang dipakai untuk sejenis lembaga pendidikan yang selanjutnya berkembang menjadi madrasah. George Makdisi mengatakan bahwa madrasah berasal dari pengajian-

pengajian yang pada umumnya diistilahkan dengan *zawiyah* (sudut) dan *Ribath* (ikatan). *Ribath* merupakan institusi belajar yang sangat awal muncul pada mesjid yang mengajarkan tasawuf melalui pengajian tentang hadist dan pada abad ke XII mengkombinasikan pengajaran tasawuf dengan hukum. Makdisi selanjutnya mengatakan bahwa mesjid Jamik yang ada di Kairo dan Damaskus memiliki *zawiyah* tempat hukum diajarkan menurut salah satu mazhab yang empat. Pada mesjid Umayyah Damaskus, terdapat delapan *zawiyah*, dua untuk mazhab Syafi'i, satu untuk mazhab Hambali, tiga untuk mazhab Hanafi satu untuk Maliki dan satu untuk mazhab lainnya (Idris, 1995: 62).

Di Aceh istilah *zawiyah* dan *meunasah* lebih menonjol dipakai. Istilah tersebut dibawa oleh ulama-ulama Aceh yang belajar di Mekkah, Kairo atau Damaskus. Pada *zawiyah-zawiyah* yang mengajarkan mazhab Syafii, hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa mazhab Syafii merupakan mazhab yang sangat dominan di Aceh bahkan Indonesia pada umumnya.

Tradisionalisme dalam pendidikan *dayah* memang merupakan warisan yang paling penting dari Timur Tengah yang masih dipertahankan dalam sistem pendidikan *dayah*. Inti dari pendidikan tradisional itu ialah pengajaran fiqh atau hukum Islam yang disebut Makdisi sebagai "Queen Of Islamic Sciences" (ratu dari ilmu keislaman), menurut salah satu dari mazhab yang empat. Tradisi ini telah dipelihara dengan baik dalam pendidikan Islam di Timur Tengah maupun dalam pendidikan *dayah* di Aceh selama ratusan tahun. Selama masa tersebut, hubungan Aceh dengan Timur Tengah terus berlanjut dan pendidikan *dayah* pun terus berlanjut. Bukan saja ulama-ulama masa Syiah Kuala yang belajar di Mekkah, tetapi ulama-ulama dari generasi Teungku Muda Wali Al Khalidi dari Aceh Selatan,

Teungku Hasan Krueng Kalee dari Aceh Besar juga masih tetap belajar di Mekkah dan menjadi tokoh pembangun pendidikan yang sangat penting di Aceh.

Dayah bukanlah satu-satunya lembaga tradisional di Aceh. Di samping *dayah*, masyarakat Aceh juga mengenal lembaga pendidikan yang bernama *meunasah* yang memiliki kedudukan penting dalam struktur masyarakat desa atau *gampong* di Aceh. Istilah *meunasah* berasal dari kata *madrasah* yang juga berasal dari lembaga pendidikan tradisional yang pernah berkembang di Timur Tengah. Sejauh berkenaan dengan pendidikan dan fungsi-fungsi keagamaan, Institusi *meunasah* merupakan bagian dari institusi *dayah*. Perbedaannya dengan *dayah* ialah lembaga ini bukan saja dikenal sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga dikenal sebagai lembaga ibadah dan sosial kemasyarakatan yang mempunyai fungsi-fungsi yang banyak. Pada *dayah*, ibadah secara khusus dilaksanakan pada mesjid atau mushalla, tetapi pada *meunasah* fungsi mesjid dan mushalla sebagai lembaga ibadah sudah digabungkan dengan fungsi-fungsi pendidikan dan sosial budaya lainnya dalam satu institusi yang tunggal.

Secara fisik, *meunasah* merupakan sebuah bangunan yang biasanya terletak di tengah-tengah kampung atau surau tempat yang mudah dicapai oleh semua warga desa. Bangunan ini biasanya berbentuk seperti rumah tradisional Aceh dengan atap daun rumbia dan dinding yang pada umumnya sangat terbuka karena terbuat dari kayu. *Meunasah* sering dipakai dengan berbagai macam ukiran yang ada pada rumah tradisional Aceh. *Meunasah* merupakan institusi yang sangat dasar dalam masyarakat Aceh, karena pada lembaga ini berhimpun berbagai fungsi yang ada dalam masyarakat. Semua desa atau *gampong* di Aceh memiliki *meunasah* sebagai institusi sosial kemasyarakatan yang mendasar. Lembaga ini bukan saja dipakai

tempat pendidikan anak-anak dalam berbagai pendidikan agama, tetapi juga shalat berjamaah, tempat rapat, tempat kenduri, tempat Administrasi desa, tempat tidur anak-anak muda, tempat berdoa untuk orang yang sudah meninggal, tempat penyelesaian berbagai perkara di kampung dan lain sebagainya (Idris, 1995: 68).

Pentingnya kedudukan lembaga ini dalam masyarakat Aceh, sehingga ia dapat dianggap sebagai inti kebudayaan Aceh itu sendiri. Masyarakat Aceh mungkin tidak dapat merasakan keacehannya tanpa kegiatan di *meunasah* mulai dari shalat berjamaah, kenduri maulid dan kenduri khatam Al-quran pada bulan puasa, sampai pada kegiatan tidur anak-anak muda desa. Dalam masyarakat desa di Aceh, tidak pernah pergi ke *meunasah* merupakan perangai yang aib. Orang yang baru kawin ke suatu desa diharuskan datang ke *meunasah* pada waktu tertentu agar ia dengan segera menjadi warga desa setempat. Di *meunasah* inilah ia berkenalan dengan warga kampung mulai dari orang tua sampai anak-anak. Dalam tradisi Aceh, anak laki-laki memang tempat tidurnya di *meunasah* dan di sinilah anak-anak itu belajar berbagai macam norma sosial kemasyarakatan. Di sini ia belajar peraturan masyarakat, dan bagi anak-anak yang berbakat, di sinilah tempat bagi mereka untuk belajar menjadi pemimpin. Kepemimpinan dipelajari oleh anak-anak atau pemuda desa melalui berbagai kegiatan bersama, seperti tadarus, membaca Dalail Khairat atau kegiatan gotong royong desa.

Pendidikan di *meunasah* lebih banyak berorientasi pada kaum pria, karena kegiatan di *meunasah* lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Untuk kaum wanita pendidikan dasar disediakan di rumah-rumah *teungku* atau di *balee*. *Balee* tersebut merupakan lembaga *meunasah* yang dibuat terpisah karena ada kepentingan tersendiri, dan kadang-kadang tidak selalu dapat dipakai sebagai tempat

pengajian untuk anak-anak perempuan, maka untuk mereka dibuat khusus, untuk pengajian ini disebut dengan *balee*. *Balee* ini kadang-kadang tempatnya dekat dengan *meunasah*. Dalam kampung yang luas, *balee* yang jauh ini dapat pula berfungsi sebagai fasilitas jauh untuk sebuah *meunasah*. Demikian juga rumah *teungku* sendiri sering difungsikan sebagai tempat anak-anak mengaji terutama anak perempuan. Anak-anak perempuan ini tidur di tempat tersebut seperti halnya dengan anak laki-laki yang tidur di *meunasah* (Idris, 1995: 71).

Sebagai usaha yang melembaga pada masyarakat Aceh, maka pendidikan yang sangat dasar adalah pendidikan yang dilaksanakan melalui lembaga *meunasah* dan *dayah*. Dalam konsep ini termasuk juga lembaga yang disebut dengan *balee* atau *rangrang*. Peranan *meunasah* dan *dayah* sebagai lembaga pendidikan utama dalam masyarakat bukan saja dapat kita baca melalui literatur tentang Aceh, tetapi juga pada masih adanya lembaga-lembaga tersebut dalam masyarakat sampai sampai sekarang. Usaha-usaha pendidikan di Aceh melalui *meunasah* memang sudah sudah sangat melembaga dan membudaya, sehingga meskipun dewasa ini di Aceh sudah memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang baru, namun masyarakat masih tidak mau dengan serta merta meninggalkan keberadaan lembaga ini. Pendidikan yang dilaksanakan melalui *meunasah* merupakan pendidikan dasar pada masyarakat Aceh. Semua kampung di Aceh memiliki *meunasah* yang disamping peranannya sebagai lembaga pendidikan juga merupakan peranan kemasyarakatan lainnya.

Dayah sebagai lembaga pendidikan yang berasal dari masyarakat sebelum kedatangan Belanda, merupakan lembaga yang khusus menyelenggarakan pendidikan. Dilihat dari istilahnya, *dayah*

berasal dari istilah zawiyah dalam bahasa Arab yang berarti sudut. Ini disebabkan dalam tradisi Islam pendidikan dan pengajaran pada mulanya dilaksanakan di sudut-sudut mesjid. Setelah lembaga yang memakai tempat di sudut-sudut itu menjadi besar, maka ia dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lainnya, namun mesjid tetap menjadi pusatnya.

Pendidikan sistem *dayah* memiliki beberapa ciri penting. Ciri *dayah* yang sangat menonjol adalah pemondokan untuk murib dalam satu kompleks bersama-sama *teungku*. Karena pemondokan ini, *dayah* disebut juga dengan pondok atau pondok pesantren. Menurut sebagian orang istilah pondok ini berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat tinggal. Tradisi *dayah* untuk memberikan pemondokan kepada murib masih terus berlanjut sampai sekarang, meskipun ada lembaga-lembaga yang menamakan dirinya *dayah* yang tidak memiliki pemondokan yang memenuhi syarat. Secara struktural pemondokan *murib* sangat penting dalam pembinaan pendidikan. Pemondokan *murib* bersama-sama *teungku* merupakan satu komunitas yang sangat terpadu yang proses pendidikan pembentukan kepribadian dapat berjalan secara alamiah. Ciri lain pendidikan *dayah* adalah pengajarannya sangat terpusat pada ilmu-ilmu agama dalam pengertian tradisional (Idris, 1995: 10).

Tradisi pendidikan *dayah* adalah tradisi yang sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat dan dibiayai oleh masyarakat. Partisipasi pemerintah dalam pengembangan lembaga pendidikan ini masih sangat terbatas. Tradisi pendidikan yang seluruhnya dilaksanakan oleh masyarakat ini mungkin berasal dari zaman lampau yang lembaga-lembaga *dayah* dibangun oleh ulama-ulama. Bahkan yang lebih menonjol lagi ialah lembaga *dayah* umumnya dimiliki oleh perorangan, sehingga lembaga itu sangat peka terhadap berbagai

perubahan dalam masyarakat. Kesenambungan pendidikan model *dayah* semata-mata karena akar budaya yang sudah begitu mendalam dalam kehidupan masyarakat.

2. Sistem Pendidikan Pada Masa Kolonial Belanda

Belanda yang menguasai Aceh sejak dekade kedua abad ke-20 tidak melanjutkan sistem pendidikan *dayah* di Aceh. Pendidikan sistem sekolah yang telah diterapkannya di daerah-daerah lain yang lebih dahulu dikuasainya, dikembangkan juga di Aceh. Pemerintah Hindia Belanda mulai mengembangkan sekolah di Indonesia pada pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1849 untuk pertama kalinya pemerintah Hindia Belanda mendirikan Sekolah Dasar tiga tahun dan Sekolah Guru pada tahun 1852. Pada tahun 1854 sebuah peraturan organik dikeluarkan yang mengesahkan kepada pemerintah kolonial untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak pribumi. Pada tahun 1867 Departemen Pendidikan didirikan dan sejak itu sejumlah sekolah dasar untuk anak-anak Indonesia bertambah dengan cepat, sehingga pada tahun 1892 jumlah anak-anak Indonesia pada sekolah tersebut sudah mencapai 7000 orang. Pada tahun 1892 Belanda memperkenalkan dua macam sekolah lagi yaitu Sekolah Klas I (*eerste klasse*) untuk anak-anak golongan aristokrat dan orang kaya dan Sekolah Klas II (*tweede klasse*) untuk anak-anak orang biasa. Pada tahun 1907 Belanda mendirikan sekolah desa (*volkschool*) yang merupakan satu terobosan, karena untuk pertama sekali sistem pendidikan Barat diperkenalkan pada masyarakat luas.

Menurut statement yang ditulis dalam buku *10 tahun Darusalam dan Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Aceh* (1959), untuk daerah Aceh pendidikan model Barat yang pertama sekali diterapkan oleh Belanda adalah di Singkil, yang bertepatan dengan Tapanuli tempat pendidikan model Belanda sudah duluan diterapkan.

Setelah kekuasaan Belanda bertambah kuat, maka sekolah-sekolah Belanda pun mulai dibangun di Aceh. Sekolah-sekolah Belanda pada tingkat dasar meliputi *volkschool* (sekolah desa), *Inlandsche vervolgschool* (sekolah bumi putera lanjutan), *Meisjesschool* (sekolah puteri), *vervolgschool-met Nederlandsche School* (sekolah dasar Belanda untuk bumiputera), *Europeesche lagere School* (sekolah dasar untuk anak-anak Eropa), *Hollandsche Chinese school* (sekolah Belanda untuk Cina), dan beberapa jenis sekolah lainnya. Pada tingkat menengah Belanda mendirikan sekolah MULO di Kutaraja yang merupakan satu-satunya sekolah menengah pada waktu itu (Idris, 1995: 11-12).

Volkschool yaitu sekolah desa atau sekolah rakyat secara resmi untuk pertama kali dibuka pada tanggal 30 Desember 1907. Pembukaan ini hasil dari prakarsa Van Daalen yang pada waktu itu berkedudukan sebagai gubernur militer/sipil untuk Aceh dan daerah taklukannya. Sekolah yang dibuka tersebut berada di Distrik Ulee Lheue, Aceh Besar dengan jumlah murid untuk tahun pertama sebanyak 38 orang. Dua sekolah serupa yang dibuka di Aceh Besar pada tahun berikutnya adalah di Lam lagang, Distrik Mesjid Raya, sebelah kiri sungai Aceh, dan di Peukan Bada, distrik VI mukim dalam dalam sagi XXV mukim. Di luar Aceh Besar pada tahun yang sama dibuka dua sekolah serupa, masing-masing satu sekolah di Bireuen dan Lhoksukon.

Pada tahun-tahun berikutnya jumlah murid yang masuk sekolah tersebut semakin meningkat dan karenanya pengembangan-pengembangan sekolah ini dilakukan terus ke daerah-daerah lain di Aceh. Pada tahun yang sama di Aceh Besar telah berhasil dibuka sebanyak 18 sekolah desa, sementara di luar Aceh Besar masih tetap dua sekolah, dan karenanya sekolah-sekolah itu pada tahun 1909

telah ada sebanyak 20 buah di seluruh Aceh. Pada waktu itu diperkirakan dalam jangka waktu setahun jumlah sekolah tersebut untuk Aceh Besar meningkat menjadi 50 sekolah. Sementara pada tahun yang sama sebanyak 18 putera uleebalang dikirim ke Forte de Kock (Bukit Tinggi). Daerah-daerah yang dipilih untuk pembukaan-pembukaan sekolah desa adalah daerah-daerah yang para uleebalangnya dapat menunjukkan kerjasama yang baik untuk maksud tersebut. Pada 1910 jumlah sekolah desa di seluruh Aceh sebanyak 89 sekolah dengan perincian, 53 sekolah di Aceh Besar, 22 di Pantai Aceh Utara, 9 di Aceh Timur dan 5 di Babel. Setahun kemudian sekolah ini mengalami peningkatan menjadi 125 sekolah dengan menampung 6.000 orang murid.

Pada tahun 1914 keadaan sekolah ini terus meningkat. Jumlah sekolah desa mencapai 164 buah dengan murid yang ditampung menjadi sekitar 8.200 orang. Pada tahun 1915 jumlah sekolah desa meningkat lagi menjadi 205 sekolah, sementara sekolah puteri telah mencapai 6 sekolah, jumlah murid pada tahun ini sebanyak 11.300 orang. Pembukaan sekolah-sekolah desa segera menimbulkan masalah yaitu kekurangan tenaga guru. Pada tahun itu diharapkan dalam jangka waktu 1 tahun masalah tersebut sudah dapat teratasi. Untuk menyediakan tenaga guru direncanakan pada tahun ajaran 1910-1911 di Kutaraja akan dibuka sebuah sekolah guru untuk tenaga-tenaga pengajar di sekolah desa. Calon-calon guru yang akan didik di sekolah-sekolah tersebut diambil dari 24 murid lulusan sekolah desa. Namun karena alasan keuangan rencana tersebut terpaksa ditunda untuk tahun ajaran tersebut. Sejak awal pembukaan sekolah-sekolah desa tersebut, tenaga guru memang didatangkan dari luar daerah, menurut Teungku Ismail Yakub guru yang diangkat itu adalah tenaga-tenaga yang diyakini loyalitasnya kepada pemerintah

Hindia Belanda. Oleh karena tidak sepenuhnya mengandalkan tenaga guru dari daerah luar, maka tenaga itu harus diciptakan di dalam daerah Aceh sendiri. Guru-guru yang diangkat sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah desa dipandang sudah memiliki kompetensi yang cukup kalau sudah pandai menyanyi dan sedikit menghitung. Kepada mereka diberi fasilitas yang tidak tanggung-tanggung, misalnya, dibebaskan naik Kereta Api ke segala penjuru (Idris, 1995: 240).

Pemerintah kolonial Belanda juga membuka sekolah-sekolah yang dikhususkan untuk murid-murid wanita yang disebut *Meisjesscholen*. Sekolah ini untuk pertama kali juga dibuka di Ulee Lheue, Kemukiman Meuraksa. Pembukaan sekolah ini mendapat dukungan sepenuhnya dari Teungku Teungoh, uleebalang daerah tersebut. setelah dimulai di Ulee Lheue, sekolah putri ini selanjutnya pada tahun 1912 juga dibuka di Meureudu dan Kutacane. Pada tahun itu murid putri yang bersekolah di Ulee Lheue sudah mencapai 86 murid. jumlah sekolah putri diseluruh Aceh pada tahun 1915 berjumlah 9 sekolah. Pada sekolah putri ini sebagian besar waktu belajar diperuntukkan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan ketrampilan pekerjaan tangan wanita seperti menjahit, merenda, bordir, sulaman, adat istiadat dan sopan santun. Sama halnya dengan sekolah rakyat, sekolah putri ini juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan karenanya sekolah serupa ini juga dikembangkan di daerah-daerah uleebalang di luar Aceh Besar.

Murid-murid yang berhasil menamatkan pendidikannya pada *Volkschool* dapat melanjutkan pendidikannya pada *Vervolgschool*. namun demikian, kenyataannya menunjukkan bahwa murid-murid yang melanjutkan pada *Vervolgschool* adalah anak-anak dari warga desa yang berkedudukan sosial dan ekonomi mereka lebih baik dari

penduduk biasa, dan juga anak-anak dari pegawai kolonial Belanda. Meskipun dikatakan bahwa lama masa belajar pada *Vervolgschool* itu adalah selama 2 tahun, namun karena kebutuhan pada waktu itu, maka untuk beberapa *Vervolgschool* sengaja dibuka satu kelas khusus yang memberikan pengajaran pengetahuan pertanian dan peternakan, di samping pelajaran lain tentang perikanan, perbankan dan kredit rakyat. Apabila sekolah yang dibuka untuk murid-murid pedesaan disebut dengan *Volkschool*, maka khusus untuk golongan-golongan masyarakat lain yang terdapat dalam sistem sosial kolonial juga dibuka sekolah-sekolah yang khusus diperuntukkan untuk mereka.

Anak-anak yang berasal dari keluarga yang ingin dapat berbahasa Belanda, pemerintah kolonial membuka sekolah dasar dengan masa belajar 7 tahun yang dapat disebut dengan *Holland Inlandsche School* (HIS). Dibandingkan dengan sekolah desa biasa, fasilitas sekolah ini juga lebih baik dan lengkap. Pada sekolah-sekolah ini putra-putra uleebalang dan pegawai kolonial lainnya diterima untuk menerima pendidikan mereka. Oleh karena sekolah tersebut mempunyai latar belakang yang demikian, maka jumlah sekolah serupa di Aceh hanya terbatas di kota-kota besar saja.

HIS untuk pertama kali dibuka di Kutaraja pada tahun 1915 dan selanjutnya di Langsa dan Lhokseumawe. Pada tahun 1928 sekolah seperti itu juga dibuka di Sigli dan Tapaktuan. Pada tahun 1939 jumlah sekolah seluruhnya di Aceh adalah delapan buah. Pada beberapa kota besar oleh Pemerintah Hindia Belanda juga dibuka sekolah-sekolah penghubung yaitu sekolah-sekolah yang dikhususkan untuk menampung murid-murid tamatan *vervolgschool* dengan bahasa pengantar bahasa Belanda.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa pada waktu pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan Barat, masyarakat Aceh telah cukup lama mengembangkan sistem pendidikan sendiri yang dengan masuknya sistem pendidikan Barat, sistem itu dianggap sebagai sistem pendidikan tradisional.

Ketika pendidikan Barat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh di perkotaan, sistem pendidikan tradisional tetap berjalan di daerah pedesaan. Dalam hal ini terjadi dualisme pendidikan yang paralel, yang masing-masing sistem pendidikan berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya persentuhan. Keadaan ini tidak bertahan secara permanen, karena para pemimpin masyarakat Aceh dipaksa oleh perkembangan pendidikan Barat untuk merubah sikap (Ismail et al., 1995: 242-243).

Perkembangan sekolah-sekolah yang diciptakan Pemerintah Hindia Belanda telah menyebabkan semakin banyak anak-anak Aceh yang mengikuti pendidikan mereka pada lembaga sekolah tersebut. Dalam pandangan ulama keadaan seperti itu akan menyebabkan semakin banyak anak-anak Aceh yang dijauhkan dari pendidikan Islam. Oleh karena itu, mereka memodernisasi lembaga-lembaga pendidikan *dayah* menjadi madrasah Belanda. Dengan cara itu murid-murid madrasah memperoleh pengetahuan umum, tetapi dengan tidak meninggalkan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan agama Islam. Perubahan yang mendasar ini terjadi sekitar tahun 1930-an. Beberapa penulis Aceh yang menyadari arti perubahan tersebut menyebutkan bahwa perubahan itu sebagai awal masa baru bagi perkembangan masyarakat Aceh.

Walaupun tentara kolonial Belanda secara umum telah mulai dapat menaklukkan perlawanan Aceh pada 1910, namun niat pemerintah kolonial Belanda untuk mendirikan sekolah guna

mencerdaskan rakyat Aceh, selain dari niat jahatnya untuk menjajah dan memeras rakyat Aceh dengan berbagai cara yang dapat terjangkau oleh mereka. Sekolah atau pendidikan yang diasuh oleh para ulama dianggapnya sebagai duri dalam daging, karena menurut pandangan mereka tujuan pendidikan agama itu tidak lain kecuali untuk menanamkan rasa kebencian dalam jiwa anak-anak dan keturunan orang Aceh terhadap pemerintah kolonial Belanda. Bahkan pendidikan agama dianggap sebagai alat untuk membentuk dan mengumpulkan kekuatan balas dendam terhadap pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, pendidikan agama harus dihapus di Aceh dan diganti dengan pendidikan lain yang sesuai dengan keinginan Belanda.

Sesuai dengan maksud tersebut, pemerintah kolonial Belanda mendirikan dua macam bentuk sekolah bagi rakyat Aceh. Pertama, sekolah rakyat biasa dan kedua, sekolah untuk golongan elite. Untuk rakyat biasa didirikan sekolah yang bernama *volkschool* tahun 1907. Lamanya belajar tiga tahun dan mata pelajarannya berkisar sekitar membaca dan menulis dalam bahasa Melayu dengan menggunakan tulisan latin. Sekolah ini tidak mendapatkan sambutan dari rakyat Aceh, karena berbau kolonial dan bencinya tingkah laku orang kafir yang kejam dan membunuh para ulama dan mujahid yang melawan mereka. Mereka membaikot sistem pendidikan Belanda, karena dendam mereka yang tidak habis-habis terhadap kolonial Belanda. Oleh karena itu, tidak heran pada waktu itu timbul anggapan bahwa siapa yang bersekolah di sekolah yang didirikan oleh kolonial Belanda, mereka akan menjadi kafir.

Sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dan diterima oleh sebagian rakyat Aceh berbarengan dengan masuknya Sarikat Islam pada tahun 1920. Perjuangan SI bertujuan di samping

untuk melepaskan rakyat Aceh dari tindakan penjajahan, juga menginginkan rakyat Indonesia melek huruf dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Apabila dikaitkan dengan pengaruh perjuangan SI dan kesadaran rakyat Aceh terhadap pendidikan, maka jumlah sekolah desa itu bertambah dengan jumlah murid meningkat menjadi 33.000 pada tahun 1935, mulai tahun 1938, pemerintah Hindia Belanda membuka lagi pendidikan lainnya.

Meskipun banyak penulis yang menyebutkan bahwa sistem pendidikan Barat mulai diperkenalkan di Aceh pada awal abad ke-20, namun sulit untuk dapat menetapkan angka tahun yang pasti kapan sistem pendidikan untuk pertama kali dimulai di Aceh (Ismail et. al., 1995: 235). Pada tahun 1900 disebutkan bahwa ada beberapa orang putera uleebalang di antaranya dua orang saudara uleebalang Idi Rayeuk diikutsertakan mengikuti pada sebuah sekolah Belanda di Kutaraja. Keadaan ini menunjukkan bahwa jauh sebelum penduduk setempat mengikuti sekolah-sekolah yang disediakan khusus kepada mereka, di Aceh telah dibuka sekolah-sekolah yang diperuntukkan kepada anak-anak pegawai kolonial Belanda yang bertugas di Aceh. Pendidikan putera-puteri *uleebalang* atau dari keluarga Sultan Aceh di dalam wilayah Aceh Besar sistem pendidikan Barat dimulai sejak tahun 1907. Tiga kepala pemerintahan adat, yaitu Teuku Nyak Banta Lam Reung, Teuku Nek Ulee Lheue, dan Teuku Raja Itam Peukan Bada, yang oleh para penguasa kolonial dianggap sebagai kepala pemerintahan adat yang berwawasan luas mengambil inisiatif untuk mengikutsertakan putera-puteri mereka dalam sistem pendidikan Barat.

Kepala pemerintahan adat ini meminta agar guru-guru yang mengajar pada sekolah-sekolah Belanda bersedia mengajar bahasa Belanda kepada putera-putera mereka. Dengan demikian, putera-

putera mereka akan diterima mengikuti pendidikan pada sekolah-sekolah yang khusus disediakan untuk putera-puteri kolonial. Pemerintah Belanda menerima usulan tersebut dan memberikan biaya khusus untuk bimbingan program tersebut, sampai putera-puteri *uleebalang* tersebut berhasil diterima di sekolah-sekolah Belanda. Keputusan tersebut ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada bulan September 1907. Sementara itu dengan cara mengambil jalan pintas dengan tidak terlebih dahulu mengikuti pendidikan pada sekolah Belanda, pada tahun 1908 telah ada 10 putera *uleebalang* dan mereka yang berasal dari keluarga Sultan Aceh yang telah dikirim ke Bandung.

Putera-putera *uleebalang* yang telah mengikuti pendidikan pada sekolah-sekolah Belanda tersebut baru dikirim ke Forte de Kock (Bukit Tinggi). Pengiriman putera-putera *uleebalang* ke luar daerah terus berlangsung selama pemerintahan kolonial Belanda berkuasa di Aceh. Mereka pada umumnya mengikuti pendidikan pada sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah, misalnya sekolah khusus untuk putera-putera kepala pemerintahan bumiputera yang disebut *Hoofdenzoon School* di Asahan, *OSVIA* di Bandung dan Serang, *Bestuur School* di Batavia dan *Mosvia* di Madiun.

Penyertaan putera-putera *uleebalang* untuk mengikuti pendidikan pada sekolah untuk anak-anak pegawai Belanda adalah salah satu alternatif yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam memberikan kesempatan belajar kepada putera-putera *uleebalang*. Namun demikian oleh karena pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh Politik Etis, maka mereka mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada putera-putera penduduk setempat. Untuk maksud tersebut di Aceh didirikan sekolah-sekolah rendah atau

sekolah rakyat seperti halnya sekolah desa di pulau Jawa, tetapi di Aceh disebut sekolah *mukim*.

Dibandingkan dengan jenis pendidikan yang diperkenalkan pemerintah kolonial Belanda di pulau Jawa jenis pendidikan yang kembangkan di Aceh sangat terbatas. Di Aceh sekolah-sekolah yang dibuka yaitu *volkschool* dengan masa belajar tiga tahun.

3. Sistem Pendidikan Pada Masa Pendudukan Jepang

Tentara pendudukan Jepang yang menduduki Aceh secara singkat, karena itu tidak sempat sepenuhnya menjalankan politik pendidikannya di daerah ini. Dari gerak-gerik pemerintah Jepang selama pendudukannya dapat diduga bahwa pemerintah Jepang mempunyai rencana pendidikan yang besar, yaitu memasukkan Indonesia kedalam Asia Timur Raya ciptaan Jepang. Akan tetapi Jepang dikalahkan oleh sekutu sebelum rencana itu terlaksana.

Ada beberapa catatan pendidikan selama pendudukan Jepang. Diantaranya menghapuskan semua sekolah yang berbau Belanda. Sekolah HIS dan *Europeaschool*, dijadikan sekolah rakyat dan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar diganti dengan bahasa Indonesia atau Melayu. Sekolah MULO di Kutaraja dijadikan sekolah menengah biasa (*Tyugakko*). Bahasa Jepang diajarkan tiap-tiap sekolah, lagu kimigayo, wajib dipelajari dan diajarkan di semua sekolah. Para guru wajib mempelajari bahasa Jepang. Kursus bahasa Jepang dibuka di berbagai tempat. Disamping itu, adapula sebuah sekolah guru yang dalam bahasa Jepang disebut *Sihan Gakko*. Sekolah agama diperbolehkan berjalan seperti biasa dan dianjurkan mempelajari bahasa Jepang bagi sekolah-sekolah yang ada gurunya. Pada waktu itu terdapat dua sekolah guru, yaitu, sihan gakko di Kutaraja dan sekolah normal Islam di Bireuen. Kalau ada ulang tahun

kerajaan Jepang yang diadakan di Kutaraja, kedua sekolah guru itu diundang untuk ikut hadir, ikut pertandingan atletik dan olahraga (Husein, 1995: 58).

Salah satu gejala sosial yang berkenaan dengan pendidikan pada masa pendudukan Jepang, sebagian dari pemuda Aceh memperoleh kesempatan untuk masuk pendidikan militer Jepang, dengan mendaftarkan diri sebagai *giyugun* yang berpusat di Lhokseumawe dan beberapa tempat lainnya di Aceh. Banyak pemuda Aceh yang menggunakan kesempatan ini, seperti Syamaun Gaharu, Hasan Saleh, Hasballah Haji dan lain sebagainya (Husein, 1995: 59). Di samping itu, semua keinginan memenangkan perang Asia Timur Raya pada anak-anak sekolah itu juga bermaksud menanamkan semangat dan ideologi "*hakko ichu*" dalam dada rakyat dan pemuda Indonesia, yang bangsa Jepang adalah bangsa Asia adalah pemimpin Asia, dan juga diwajibkan *keire* (hormat) ke Tokyo menghormati Tenno Heika. Guru-guru dan siswa diajarkan baris-berbaris secara militer Jepang, kedisiplinan, gotong royong membuat lapangan terbang dan benteng pertahanan tidak pernah putus-putusnya dibebankan pada rakyat (Ali, 1995: 138).

Pada masa balatentara Jepang di Aceh tahun 1942-1945, pendidikan dasar di sekolah-sekolah negara (*kokumin gakko*). Nama ini diperuntukkan untuk *volkschool* dan *vervolgschool* pada zaman Belanda. Di atas tingkatan ini adalah sekolah menengah yang dibagi atas dua kelompok, yaitu *Tyu Gakko* (sekolah lanjutan lima tahun), dan *sihan gakko* (sekolah guru) (Ismail et al., 1995: 244). Pemerintah pendidikan Jepang sangat menyadari bahwa pendidikan adalah sarana yang sangat tepat bagi proses sosialisasi dan media penyebaran indoktrinasi para penguasa pendudukan. Oleh karena itu, pemerintah pendudukan Jepang sangat memperhatikan proses pendidikan yang berlangsung di sekolah-sekolah.

Sesuai dengan kepentingan Jepang yang selalu dipropagandakan bahwa bangsa Jepang adalah pemimpin Asia Timur Raya, maka materi yang diajarkan di sekolah-sekolah akan disesuaikan dengan ideologi-ideologi tersebut. Sekolah-sekolah yang pada masa sebelumnya mempergunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dihapus dan diganti dengan bahasa Jepang dan bahasa Melayu. Pendidikan Jasmani merupakan salah satu mata pelajaran yang dipentingkan dalam sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah pendudukan Jepang. Hal ini sudah barang tentu berkaitan erat dengan keadaan mereka pada waktu itu yang sedang terlibat perang. Perhatian mereka juga diberikan kepada lembaga pendidikan *dayah* dengan mengangkat Teungku Ismail Yakub sebagai pengawas dan pembina lembaga-lembaga pendidikan tersebut (Ismail et al., 1995: 244).

B. Struktur Dayah Pada Masa Revolusi Kemerdekaan

1. Kepemimpinan Dayah

Pemakaian istilah *dayah* di Aceh adalah sama dengan pesantren di Jawa, pondok di Malaysia atau surau di Minang Kabau. *Dayah* adalah lembaga pendidikan agama paling tua di Indonesia dimana transformasi pengajaran agama dilangsungkan secara bersahaja dalam suatu lingkungan dengan pimpinan *dayah* (istilah Aceh *Teungku Chiek*) sebagai sentralnya. Lingkungan yang dimaksud selain *Teungku Chiek* dan murid (*murib*) adalah kitab pegangan, ruang belajar, tempat pemondokan dan tempat ibadah (Saby, 1998: 31). *Teungku Chiek* selain sebagai elemen yang paling esensial di "dayah", ia seringkali bahkan merupakan pendirinya. Sehubungan dengan itu sudah sewajarnya jika pertumbuhan "*dayah*" semata-mata bergantung kepada kemampuan pribadi pemimpinnya.

Organisasi kepemimpinan *dayah* bersifat otokrasi yang mana kekuasaan tertinggi (wewenang) berada ditangan *Teungku Chiek* dan juga sudah menjadi pola umum, kepemimpinan ini diwariskan secara turun temurun. Dengan demikian pola kepemimpinan yang dipakai adalah pola kepemimpinan kharismatik. Dengan memiliki kepribadian yang kuat *Teungku chiek* berhasil menghimpun orang banyak/pengikut/*murib* dari lingkungan disekitarnya, mula-mula dari kalangan terdekat disekeliling tempat tinggalnya, kemudian menjalar dan mencapai tempat-tempat yang jauh. Salah satu ciri pendidikan *dayah* yang paling menonjol yakni adanya hubungan yang erat antara *murib* senior dengan *murib* yunior. *Murib* yang paling lama tinggal di *dayah* (*murib* senior) biasanya merupakan satu kelompok tersendiri yang memegang tanggung jawab mengurus kepentingan *dayah* sehari-hari. Disamping itu *murib* yang telah mendapat restu dari *Teungku chiek* memikul tanggung jawab mengajar *murib-murib* yunior tentang kitab-kitab dasar dan menengah. Bahkan ada beberapa diantaranya yang dipercaya oleh pimpinan *dayah* sebagai penyebar agama (*mubaligh*) di daerah sekitar *dayah*. Mereka tentunya adalah yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang soal agama, tetapi juga ramah dan pandai bicara sehingga mampu menarik perhatian khalayak ramai (Galba, 1991: 51).

Hubungan antara *murib* senior dengan yunior yang umurnya jauh lebih tua lebih mengarah kepada hubungan antara orang tua dengan anaknya, antara guru dengan *murib*. Hubungan antara sesama *murib* yunior lebih mengarah kepada corak hubungan pertemuan. Di dalam struktur *dayah* kedudukan mereka adalah sama, karena itu dalam pergaulan sehari-hari mereka menunjukkan sikap yang bebas tetapi masih dalam batas-batas kewajara (Galba, 1991: 50-51). Hubungan *murib* senior-yunior yang saling memberi manfaat itu telah

menciptakan kekerabatan baru dalam hubungan antara mereka bahkan hingga pasca *dayah* nantinya (Saby, 1998: 30-31).

Menurut Teungku Abbas, seorang informan, mengatakan selain mengurus masalah pendidikan dan pembinaan *murib-murib* di lingkungan *dayah*, dalam urusan keluar *Teungku Chik* selalu mengadakan hubungan dengan masyarakat sekitarnya, terutama dengan golongan ekonomi lemah dan tidak berpendidikan. Sebaliknya *dayah* memperoleh bantuan dana pengelolaan dan pengembangan yang dihimpun dari donatur tetap/tidak tetap serta para simpatisan, walaupun pada umumnya pimpinan *dayah* sendiri memiliki sumber khusus dari hasil pertanian milik keluarga yang dikerjakan bersama oleh para *murib* dengan masyarakat sekitarnya.

2. Hubungan Murid dengan Guru

Salah satu ciri yang sangat menonjol pada sistem pendidikan *dayah* di Aceh ialah para *murib* mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan gurunya (*teungku*). *Teungku* bagi *murib* merupakan seorang yang maksum yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Para *murib* berdomisili di *dayah* dalam jangka waktu yang lama sehingga secara terus-menerus *murib* selalu berhubungan dengan gurunya, berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat lingkungan sekitarnya. Hubungan antara *teungku* dengan *murib* diatur secara impersonal. Dalam kehidupan *dayah*, *teungku* berperan sebagai orang tua *murib* yang sekaligus memberi uswatun pada *murib-muribnya*. Interaksi yang tidak resmi diserap dan dicerna dalam kehidupan para *murib*, sehingga menimbulkan rasa keakraban yang mendalam (Yusuf, 1995: 24).

Fungsi guru bukan hanya memberikan ilmu, tetapi juga mendidik, membimbing, bahkan bertanggung jawab sepenuhnya

terhadap kehidupan dan perkembangan spritual *murib*. Guru karena berperan secara aktif kemudian menjadi figur orang tua bagi *murib*, yang berlanjut dengan munculnya guru sebagai orang yang mempunyai otoritas untuk menghukumnya bila berbuat salah atau menyuruh *murib* untuk membantu melakukan pekerjaan tertentu milik sang guru, seperti pergi ke sawah dan mengerjakan kebun. Hubungan seperti itu akan terus berlanjut hingga ke generasi selanjutnya. Anak seorang guru (bahkan keluarga dekatnya) tetap menempati posisi sosial terhormat di mata *muribnya*, sehingga terhadap anak-anak gurunya pun *murib* memanggil dengan "*teungku*". Sebagai akibatnya guru adalah personifikasi dari segala ilmu, kebenaran dan kebajikan, para *murib* kemudian menjadi anak-anak yang patuh, hamba yang setia yang secara tidak terasa menciptakan imej yang memproyeksi gurunya sebagai figur ideal, imej inilah yang merupakan *chiekal* bakal kekuatan ikatan kekeluargaan antara guru dengan *murib* di sebuah *dayah* (Zulkarnaini, 1997: 12). Tanggungjawab guru terhadap *murib* tidak hanya diterapkan di waktu belajar saja, tetapi juga di luar jam pelajaran, karena bimbingan yang diberikan bersifat menyeluruh. Peran guru sebagai tempat bertanya dan sebagai orang tua menjadikannya sebagai tempat *murib* mengadu, terutama jika *murib* mempunyai masalah yang tidak dapat dipecahkan sendiri, ataupun masalah-masalah antar *murib*. Sudah tentu banyak masalah yang timbul, karena mereka berasal dari berbagai daerah dan berbagai tingkat usia, walaupun tinggal di pondok secara berkelompok-kelompok berdasarkan asal daerah. Dengan demikian guru dapat mengikuti tingkah laku dan kemampuan belajar serta kesulitan yang dihadapi oleh *murib-murib* tersebut.

Di lingkungan dayah *murib* tunduk dan patuh, hidup hemat dan sederhana di samping tolong-menolong dan solidaritas yang

tinggi serta kedisiplinan sangat diutamakan, mereka siap menderita untuk tercapainya tujuan. Ilmu, amal, kesetiaan, keberanian dan kepasrahan bagi mereka adalah bahagian yang melekat pada keyakinan, agama dan kehidupan dunia yang tidak dapat dipisahkan. Artinya semua kegiatan yang dilakukan harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama (Yusuf, 1995: 25).

3. Lingkungan dan Sosio - Psikologis

Seorang pemimpin *dayah* disamping sebagai seorang yang mengajak dan membimbing masyarakat kepada kebajikan dan ketaqwaan, ia juga harus sanggup dan berani menyebarkan ilmu yang dimilikinya dalam penyampaian tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari antara sesama manusia selalu terjadi hubungan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Selain berkasih sayang terhadap sesama ummat yang seagama juga diperintahkan hubungan kemanusiaan dengan sesama makhluk Tuhan walaupun tidak seagama, cara yang ditempuh oleh pimpinan *dayah* untuk terbentuknya suatu persaudaraan yang baik bagi masyarakat adalah dengan selalu mengadakan shalat berjama'ah di lingkungan *dayah* sendiri ataupun di tempat-tempat ibadah di sekitarnya.

Dalam pengabdian *murib* kepada gurunya terdapat efek psikologis untuk patuh dan taat yang dirasakan sebagai kesejukan dan ketentraman dalam jiwa. Pelaksanaan hukuman-hukuman atau sanksi terhadap *murib* yang melakukan kesalahan tidak pernah berakibat timbulnya rasa dendam, kebencian atau sikap negatif lainnya. "Tidak ada pukulan yang dijatuhkan seorang guru ke tubuh *muribnya*, melainkan akan menjadi pelindung dari api neraka". Keyakinan ini secara dogmatis memberikan kompensasi yang tidak

ternilai bagi sang *murib* untuk sanksi-sanksi yang diberikan guru kepadanya, sehingga mereka merasa tidak pernah dirugikan dalam kondisi apapun. Keputusan Allah Subhanahu Wata'alah dan guru selamanya diberikan untuk keselamatan dan kebaikan.

Lokasi *dayah* yang letaknya jauh dari perkotaan dan keramaian, bentuk fisik pondok yang umumnya sederhana, serta keberadaan tempat ibadah ditengah-tengah lingkungan *dayah*, menjadikan kondisi *dayah* terkesan religius dan lebih akrab dengan alam. *Dayah* cenderung mencari lokasi yang agak terpencil dan dekat dengan sungai, untuk menemukan kondisi yang lebih sesuai bagi suasana hati dan rasa religius yang lebih kental (Zulkarnaini, 1997: 16-17), sebagai contoh dapat diperhatikan letak *Dayah Tanoh Abee* di Tanoh Abee yang berada di tepi sungai proyek, *dayah Lambhuk* di tepi sungai Aceh, *dayah Nurul Fatha* di Seulimeum dan *dayah Ulee Titi*, dan sebagainya.

Ketaatan *murib* kepada gurunya terungkap pula dalam sebuah ungkapan pada masyarakat Aceh yaitu "... *Meunyo han ta pateh nasehat guree akhee teuma apuy neuraka*", artinya "... apabila tidak mendengar nasehat guru pada akhirnya akan masuk neraka". Karenanya para ulama *dayah* ini sangat berpengaruh dalam masyarakatnya, apa saja yang mereka perintahkan akan didengar dan dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat menganggap mereka bukan hanya sebagai seorang yang memiliki pengetahuan agama yang lebih luas dari pada orang kebanyakan, tetapi juga diyakini bahwa doa-doa mereka mampu mendatangkan berkah atau pun membawa malapetaka. Selama perang melawan Belanda, *teungku* memotivasi masyarakat dengan menyatakan bahwa ulama adalah "*warashatul anbiya*" (pewaris nabi) oleh karenanya mereka wajib berjihad. *Warashatul Anbiya* itu akan gugur apabila *teungku* (ulama) bergaul

dengan penguasa yang zalim (yang tidak senang kepada ulama dan Islam). Hal inilah yang menyebabkan para ulama tidak ada yang tunduk atau menyerah kepada Belanda ketika terjadi peperangan melawan Belanda.

Untuk menggerakkan rakyat dan *murib-muribnya* agar ikut berperang melawan Belanda dibuatlah tulisan berupa syair-syair atau hikayat-hikayat perang yang ditulis dalam bentuk buku-buku kecil dengan tulisan tangan, seperti "hikayat perang gompenni" dan "hikayat perang sabi". Akibatnya bagi mereka yang membaca hikayat tersebut dengan penuh semangat terjun dalam kancah peperangan untuk membela agama dan mempertahankan wilayah mereka dari rongrongan Belanda yang mereka sebut dengan istilah "*kaphee*" (kafir) (Sufi, 1996: 38-42).

Walaupun perang berkecamuk, sistem pendidikan Islam tetap berlanjut. Hal ini karena para ulama sadar akan pentingnya peranan pendidikan Islam dalam menempa pendidikan rakyat. Bila keimanan telah luntur, semangat bisa patah, bila semangat telah patah, senjata bagaimanapun kuatnya tidak akan ada artinya. Itulah sebabnya kemana pun ulama hijrah, kitab-kitab mereka tidak terlupa untuk diikutsertakan, sebab kitab adalah pedoman dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Dengan tetap berjalannya pendidikan Islam di gunung-gunung dan di hutan-hutan, rakyat Aceh tidak akan keracunan ideologi (M. Thamrin Z, 1975: 187-188).

4. Sistem Ilmu dan Pendidikan Dayah

Dalam lembaga pendidikan Islam tradisional di Aceh, setelah tingkat meunasah dan *rangrang*, terdapat tingkat yang lebih tinggi yaitu yang disebut *dayah*. Seorang pemuda yang belajar atau pergi menuntut ilmu ke sebuah *dayah* di sebut dengan istilah "*jak*

meudagang" yang artinya pergi menuntut ilmu yang biasanya berlokasi di luar wilayahnya. Santri yang sedang menuntut ilmu ini disebut *murib* (murid). Menuntut ilmu bagi mereka murni dilandasi oleh motivasi yang suci religius, yaitu sebagai pemenuhan kewajiban agama dan dalam rangka untuk lebih mengenal Tuhannya. Disisi lain mereka juga diharapkan untuk menjadi guru atau da'i yang akan menyebarkan pesan-pesan Islam ke tengah-tengah masyarakat (Iskandar, 1997: 28-30).

Pendidikan di *dayah* terbagi dalam tiga tingkatan yaitu tingkat dasar, tingkat menengah dan tingkat tinggi. Pada tingkat dasar biasanya diajar oleh seorang *murib* senior yang sudah tinggi ilmunya, begitu juga ditingkat menengah diajarkan oleh seorang *murib* yang sudah mendapat kepercayaan dari gurunya. *Murib-murib* pengajar ini disebut dengan "*teungku rangkang*" atau "*teungku waki*". Sedangkan *teungku waki* ini diajar oleh *teungku chiek* (*teungku* besar), yang dinamakan *teungku balee* (Sunny, 1980: 325). Sistem pengajaran adalah sistem halaqah, dimana *murib* duduk bersila, melingkar dengan membuka kitab masing-masing atau bergabung dengan temannya, sementara guru duduk di tengah-tengah dengan membaca kitab dan menjelaskannya. *Murib* kemudian menyimak, membaca, menghafal dan menterjemahkannya. Bagi yang tidak memahami dapat menanyakan langsung kepada gurunya, penilaian dilakukan guru dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sehari-hari. Dalam satu lingkaran biasanya untuk satu tingkatan. Proses belajar mengajar berlangsung siang dan malam. Pelajaran yang diberikan selang-seling, dan secara teratur lembaran ke lembaran hingga tamat, baru dilanjutkan dengan kitab berikutnya. Sedangkan ruang belajarnya adalah di *balee-balee* (*balee ta'lim*) yang berada di tengah-tengah lingkungan *dayah*. Dalam perbedaan tingkatannya dapat dibedakan dari kitab atau pelajaran yang diajarkan (Husaini, 1995: 56).

Semua mata pelajaran di *dayah* terdiri dari ilmu-ilmu agama saja, umpamanya bahasa Arab, fiqh, tafsir hadits, tasawuf, tauhid, usul fiqh, dan lain-lain (Husen, 1989: 512). Kitab pegangan cenderung tidak bervariasi, pengajaran agama lebih ditujukan kepada pengajaran fiqh. Pada umumnya kitab-kitab yang digunakan sebagai bacaan wajib dalam setiap jenjang pendidikan di *dayah* adalah kitab mazhab Syafi'i. Kitab-kitab tersebut antara lain : *al-Muhazab*, *Minhaj at-talibin* karangan imam Nawawi, kitab *Tuhfah* karya Syekh Ibnu Hajar dan kitab *Nihayah* karya Syekh Ramli serta *Ihya Ulumuddin* karya imam al-Ghazali. Pelajaran bahasa Arab diberikan dengan fokus tentang bahasa (al-Quran) agar *murib* lebih mudah memahami kitab-kitab yang digunakan untuk mempelajari kitab-kitab *sharaf* dan *nahwu* yang berbahasa Arab seperti; Kitab *Nizam (tsummum raf'un)*, *matan bina'*, *'awami*, *matan jurumiah*, *mutamminah* dan kitab *al-fiah* (Sufi, 1996: 15-19).

Jika *murib* dapat menyelesaikan semua kitab yang diwajibkan berarti ia telah tamat dan boleh diberi gelar *teungku*. Sebagian alumni *dayah* menjadi tenaga pengajar di almamaternya, sebagian meneruskan pelajarannya ke *dayah-dayah* lain atau pun mendirikan *dayah* sendiri, yang tentunya harus mendapat izin dari sang guru. Mendapat izin dipandang sebagai suatu prosedur yang sakral. Izin ini menjadi bukti atas keikhlasan guru terhadap berbagai ilmu yang diajarkannya, sehingga ilmu tersebut ada keberkatannya. Bagi alumni *dayah*, bila meminta sertifikat kepada guru akan memperolehnya, tapi sebagian menganggap ilmu yang diperoleh lebih penting daripada surat keterangan tersebut. Beberapa *murib dayah* berhenti belajar (istirahat) untuk beberapa waktu sebelum tamat disebabkan kekurangan dana. Masa istirahat ini mereka gunakan untuk mencari dana dengan cara kembali ke kampung mengusahakan lahan-lahan

pertanian sendiri, atau bekerja serabutan di tempat lain dan segera kembali ke *dayah* setelah dana terkumpul (Iskandar, 1997: 27-28).

Selain mempelajari kitab-kitab, *murib* juga melakukan kegiatan lain seperti acara kesenian yang bernaftaskan Islam antara lain: belajar *qasidah*, *dalail*, *meurukon* (semacam diskusi kelompok untuk membahas masalah agama dimana pesertanya dibagi dalam dua kelompok, kemudian melakukan tanya jawab yang berlangsung secara dilagukan), *rapai*, *dikee mulod* (dzikir maulid) dan sebagainya (Sufi, 1996: 12-15). Menurut Teungku Hasan, seorang informan, selain itu, latihan-latihan fisik juga dilakukan biasanya ilmu bela diri pencak silat yang juga dilakukan pada malam-malam tertentu. Pada hari-hari yang telah ditetapkan, setelah selesai shalat Dhuha *murib* bekerja membantu gurunya seperti mengolah tanah, memetik hasil kebun, membersihkan *dayah* dan pekarangannya, selain menyelesaikan urusan masing-masing seperti mencuci, memasak, membersihkan pondok.

Adapun menurut Teungku Fatahillah, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, beberapa *dayah* menganut aliran tasawuf (tarikah), seperti tarikah *syatariyah* dan *naqsabandiyah*. Pelaksanaan praktek tarikah di beberapa *dayah* di Aceh dengan menyediakan tempat khusus untuk melakukan khalwat sebagai usaha menyatukan diri dengan pencipta-Nya.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa *dayah* sebagai lembaga pendidikan mempunyai corak dan watak sendiri. Dari begitu banyak hasil yang diperoleh dari pendidikan *dayah*, di antaranya adalah tertanamnya rasa kesanggupan menderita untuk mencapai tujuan, kesederhanaan hidup dan menolong diri sendiri. Dan sebagai salah satu inti pendidikan Islam yang hidup di *dayah* adalah pengabdian terhadap masyarakat yang merupakan salah satu cara pengabdian kepada Allah Subhanahu Wata'ala (Darajat, 1975: 30).

BAB IV

KEDUDUKAN DAN PERANAN DAYAH DI ACEH PADA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN

Keberadaan *dayah* di Aceh, sudah ada sejak awal berdirinya Kerajaan Islam di Indonesia. Bersamaan dengan munculnya Kerajaan Islam yang pertama di Aceh Timur, muncul pula sistem pendidikan Islam *dayah* yang terkenal dengan sebutan *dayah* Cot Kala yang didirikan oleh Tgk. Chik Muhammad Amin. *Dayah* ini kemudian tumbuh dan berkembang menjadi pusat pendidikan Islam yang besar dan terkenal di seluruh Nusantara. Setelah Kerajaan Samudra Pasai tenggelam, di Aceh Besar muncul Kerajaan Islam baru, sebagai pelanjut dari Kerajaan Indra Purba. Kerajaan Islam baru di bekas Kerajaan Indra Purba tersebut bernama Kerajaan Bandar Aceh Darussalam (Ismuha, 1983: 30). Untuk melanjutkan pendidikan Islam yang pernah berkembang di Samudra Pasai, di bekas Kerajaan Indra Purba tersebut didirikan *dayah* Lam Peuneu'eun, di bawah pimpinan Syehk Abdullah Kan'an yang kemudian dikenal dengan *lakapnya* Tgk. Chik Lam Peuneu'eun. Sejak tumbuh dan berkembangnya kerajaan Bandar Aceh Darussalam, pendidikan *dayah* juga tumbuh dan berkembang bagaikan jamur di musim hujan.

Tradisi *dayah* merupakan kerangka sistem pendidikan Islam tradisional di Aceh, yang dalam perjalanan sejarahnya telah menjadi obyek penelitian para sarjana yang melakukan penelitian di Aceh, yaitu sejak C. Snouck Hurgronje menulis sebuah buku yang berjudul *De Atjeher*. Buku tersebut kemudian diikuti oleh para penulis lain,

baik dalam bahasa Belanda, Inggris maupun dalam bahasa Indonesia.

Lembaga pendidikan *dayah* yang tersebar diberbagai daerah di Aceh, sangat menentukan watak ke-Islaman dari kerajaan-kerajaan Islam, dan yang memegang peranan paling penting bagi penyebaran Islam sampai ke pelosok-pelosok. Dari lembaga pendidikan di *dayah* itulah asal usul sejumlah manuskrip tentang pengajaran Islam di Nusantara yang tersedia secara terbatas, yang dikumpulkan oleh Belanda dan Inggris sejak abad ke-16 (Dhofier, 1982: 17).

Dalam masa empat ratus tahun lebih Aceh telah membangun satu sistem pendidikan yang berintikan sistem pendidikan *meunasah* dan *dayah* yang telah berkembang dan menjadi basis dalam sistem pewarisan nilai-nilai budaya di Aceh. Di setiap kampung di Aceh dibangun *meunasah* dan *dayah* yang berfungsi sebagai *cultural center* dan *educational center* bagi masyarakat. Kita sebutkan sebagai *cultural center*, karena *meunasah* dan *dayah* ini memang memainkan peranan penting dalam kehidupan orang Aceh. Kita sebutkan *educational center*, karena secara formal anak-anak masyarakat Aceh memulai pendidikannya secara formal di *Meunasah* dan kemudian melanjutkan ke *dayah* dan pendidikan ini adalah pendidikan yang berintikan Islam.

Setelah anak-anak menamatkan pendidikan di *meunasah*, pada umumnya mereka akan melanjutkan pendidikannya ke *dayah*. Biasanya anak-anak Aceh pergi merantau atau *meudagang* untuk mengikuti pendidikan di *dayah-dayah*. *Dayah* adalah lembaga pendidikan yang dilengkapi dengan tempat tinggal dan dalam sistem pendidikan ini anak-anak memang terpisah dari orang tuanya. Sebagai konsekwensinya anak-anak kemudian menjadi tanggung jawab pimpinan *dayah*. Sewaktu mengikuti pendidikan pada *dayah*, *teungku*

dayah dan pemimpin *dayah* bukan saja berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga berfungsi sebagai orang tua yang harus menjaga anak-anak itu. Mereka dipatuhi dan ditaati seperti orang tua sendiri. Karena itu pula pemimpin dan *teungku dayah* juga tinggal di lingkungan *dayah* atau di tempat yang dekat dengan *dayah*.

Meskipun anak-anak berpisah dengan orang tua karena mengikuti pendidikan di *dayah*, anak-anak ini tetap mewarisi nilai-nilai budaya masyarakatnya melalui *teungku dayah*. Anak-anak belajar agama di *dayah-dayah* ini, sehingga masyarakat Aceh tidak merasa khawatir terhadap masa depan budaya Aceh yang nota bene bernafaskan Islam ini. Sebagai bagian dari produk pendidikan yang demikian, semua orang Aceh dapat disebut santri sesuai dengan istilah Clifford Geertz, dan meskipun ada sebagian orang tidak mendapat pendidikan agama di *meunasah* atau *dayah*, namun pada waktu ia dewasa ia akan tetap mendidik anak-anaknya sesuai dengan sistem ini dengan menyerahkan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan Islam ini. Masyarakat Aceh akan sangat marah pada orang tua yang tidak memberikan pendidikan agama Islam pada anak-anak mereka. Oleh karena itu, lembaga pendidikan *dayah* menjadi pilihan utama bagi mereka untuk mendidik anak-anaknya, agar menjadi anak-anak yang Islami.

Pada zaman Belanda, masyarakat Aceh menganggap keberadaan pendidikan moderen ala Barat dianggap sebagai media dalam mengkafirkan orang Aceh. Kaum santri di Aceh tetap beranggapan bahwa sistem pendidikan moderen yang diadakan oleh Belanda dianggap bertanggung jawab dalam mendangkalkan keberagamaan, keislaman dan keimanan orang Aceh. Karena pandangan yang demikian maka masyarakat Aceh yang kuat orientasi budaya Islamnya, sangat enggan menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Belanda.

Keberadaan sekolah Belanda kebanyakan hanya dihuni oleh anak-anak dari keluarga bangsawan, sehingga melahirkan golongan tersendiri. Anak-anak hasil pendidikan Barat cenderung lebih dekat dengan Belanda dan dianggap kurang mendalami agama Islam. Hal ini mungkin yang kemudian melahirkan pertentangan antara golongan ulama yang anti Belanda dan golongan bangsawan yang dianggap lebih dekat dengan Belanda yang kemudian memuncak pada peristiwa perang cumbok.

A. Kondisi dan Situasi Dayah pada Masa Revolusi Kemerdekaan

Pada masa Revolusi Fisik (1945-1949), pusat-pusat pendidikan *dayah* di Aceh banyak yang memiliki pondok (asrama). Pondok ini adalah tempat tinggal bagi para *murib* (murid) yang belajar di *dayah* tersebut. Pondok ini biasanya terbuat dari papan kayu atau bambu.

Lembaga pendidikan di *dayah* pada umumnya bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat usia murid. Ketika anak masih kecil, biasanya belajar di *meunasah-meunasah* atau *rangkang*. Setelah berumur 7 atau 8 tahun mulai diajarkan membaca alfabet Arab dan secara bertahap diajar untuk membaca Al-Qur'an. Program pengajaran ini dianggap selesai setelah si anak sudah dapat membaca sendiri Alqur'an dengan lancar dan benar. Bagi beberapa anak dari keluarga tertentu, dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pelajaran berikutnya adalah mendidik anak agar dapat membaca dan menterjemahkan buku-buku Islam klasik yang elementer yang ditulis dalam bahasa Arab. Sebagian dari mereka ini mempunyai ambisi untuk menjadi ulama, sehingga setelah berkenalan dengan beberapa kitab-kitab elementer, mereka memperdalam bahasa Arab sebagai alat untuk dapat memperdalam buku-buku tentang Fiqh (hukum Islam), usul Fiqh (pengetahuan tentang sumber-sumber dan sistem

yurisprudensi Islam), hadis adab (sastra Arab), tafsir tauhid (teologi Islam), tarikh (sejarah Islam), tasawuf dan akhlaq (etika Islam). Untuk menempuh mata pelajaran tersebut, diperlukan guru-guru terdidik dan berbobot dan diperlukan pula pendidikan yang lebih sistematis. Ini dapat mereka peroleh di *dayah-dayah*. Untuk masa-masa pascarevolusi fisik, mereka dapat memperolehnya pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) (Dhofier, 1982: 20).

Posisi dominan yang dipegang oleh lembaga pendidikan *dayah* ini sebagian disebabkan oleh suksesnya lembaga tersebut menghasilkan sejumlah besar ulama yang berkualitas tinggi yang dijiwai oleh semangat untuk menyebar luaskan dan memantapkan keimanan orang-orang Islam, terutama di pedesaan di Aceh.

Sebagai pusat pendidikan Islam tingkat menengah, *dayah* juga mendidik guru-guru agama, guru-guru lembaga pengajian dan para khatib Jum'at. Keberhasilan pemimpin-pemimpin *dayah* dalam melahirkan sejumlah besar ulama yang berkualitas tinggi adalah karena metode pendidikan yang dikembangkan oleh para *teungku dayah*.

Tujuan pendidikan semata-mata tidak hanya untuk memperkaya pikiran murid dengan penjelasan-penjelasan, tetapi juga untuk meningkatkan moral, melatih dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan bermoral dan menyiapkan para murid untuk hidup sederhana dan bersih hati. Setiap murid diajar agar menerima etik agama di atas etik-etik yang lain.

Tujuan pendidikan *dayah* bukanlah untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang dan keagungan duniawi, tetapi ditanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan.

Di antara cita-cita pendidikan *dayah* adalah latihan untuk dapat berdiri sendiri dan membina diri agar tidak menggantungkan sesuatu kepada orang lain kecuali kepada Tuhan. Para *teungku dayah* selalu menaruh perhatian dan mengembangkan watak pendidikan individual. Murid dididik sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan dirinya. Anak-anak yang cerdas dan memiliki kelebihan kemampuan dibandingkan dengan yang lainnya, diberi perhatian istimewa dan selalu didorong untuk dapat mengembangkan diri dan menerima pelajaran pribadi secukupnya. Murid-murid juga diperhatikan tingkah laku moralnya secara teliti. Kepandaian berpidato dan berdebat juga mendapat perhatian dari para guru. Kepada para murid juga ditanamkan untuk memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk melestarikan dan menyebarkan pengetahuan mereka tentang Islam kepada orang lain, mencurahkan waktu dan tenaga untuk belajar terus menerus sepanjang waktu.

Menurut tradisi *dayah*, pengetahuan seseorang diukur oleh jumlah buku yang telah dipelajari dan kepada *teungku dayah* mana ia telah berguru. Jumlah buku-buku standar dalam tulisan Arab yang dikarang oleh Ulama terkenal yang harus dibaca telah ditentukan oleh lembaga-lembaga *dayah*.

Walaupun jumlah cabang pengetahuan yang dipelajari sangat terbatas, tetapi bukan berarti pendidikan di *dayah* membatasi cara berfikir dan perhatian murid. Dalam tradisi *dayah* juga dikenal adanya pemberian ijazah, tetapi bentuknya berbeda dengan ijazah dalam sistem modern. Hubungan antara guru dan murid adalah sedemikian rupa sehingga anjuran-anjuran yang diberikan oleh sang guru dianggap oleh si murid sebagai perintah yang mutlak harus dikerjakan.

Dayah sebagai lembaga tradisional yang merupakan ciri khas pendidikan Islam di Aceh, karena *dayah* mempunyai pola hidup, sikap

yang didasari atas tradisi-tradisi masa lampau yang mengendap menjadi konsepsi dan kemudian mewarnai watak sosial dari masyarakat atau tempat kedudukan *dayah* itu sendiri, misalnya, sistem pendidikan yang masih mengutamakan kitab-kitab kuning atau gundul, antara murid perempuan dan murid laki-laki harus dipisahkan.

Keberadaan *dayah* di tengah-tengah masyarakat pada masa revolusi, tergantung kepada dukungan dan partisipasi (Ahmad, 1986: 19) masyarakat untuk menjalin hubungan timbal balik. Tokoh-tokoh masyarakat besar dan kecil berkecimpung dalam pendidikan dan dakwah Islamiah. Di samping itu, rakyat juga turut serta bekerja sama dengan penuh keiklasan dalam memperbaiki bidang fisik material dan mental spiritual.

Pendidikan Islam yang berkembang di *dayah-dayah* di Aceh pada masa revolusi, telah banyak yang berhasil mencetak kader-kader ulama, pendidik dan pemimpin-pemimpin yang mampu menggerakkan rakyatnya untuk berjuang bersama-sama mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda. Dalam kaitan ini A. Hasjmy (1983) mengatakan:

"Dalam tahun empat puluhan, para ulama Aceh terbagi dalam dua kelompok yaitu ulama Ahlussunnah wal jama'ah kaum tua dan ulama Ahlussunnah wal jama'ah kaum muda. Dalam dasar-dasar akidah tidak ada, hanya berbeda pendapat dalam masalah-masalah furu'iyah. Di luar ketentuan yang asli ini, kadang-kadang terjadi perbedaan yang tajam antara ulama kaum muda dan ulama kaum tua, dalam menghadapi masalah-masalah keduniaan, politik, ekonomi dan sosial budaya".

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa *dayah-dayah* yang berada di Aceh kebanyakan menganut faham Ahlussunnah wal

jama'ah yang banyak dianut oleh golongan tua. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, misalnya dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan, Darul Ihsan Aceh Selatan, Dayah Tgk. Fakinah dan Dayah Tanoh Abee di Aceh Besar. Namun dalam perkembangan selanjutnya, sistem pendidikan *dayah* secara bertahap walaupun lambat sekali, mengalami pergeseran (Yunus, 1979:177).

Di sisi lain, walaupun pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat, namun masih sangat tertinggal jauh dengan sistem pendidikan yang berkembang di negara-negara Barat. Dengan demikian pendidikan di Indonesia dianggap masih belum mampu menjawab problema yang ada karena masih terbatasnya sumber daya manusia. Oleh karena itulah keberadaan *dayah* dijadikan alternatif untuk mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan di masa mendatang (Husein, 1988: 172).

Pendidikan *dayah* mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang dibina dan diatur oleh pemerintah maupun organisasi-organisasi tertentu. Berdiri dan berkembangnya *dayah* tergantung pada pribadi seorang ulama yang berjiwa besar, istiqamah dan bersemangat jihat fisabilillah. Dia hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Dalam hidupnya selalu mengikuti jejak tokoh-tokoh Islam dengan cara menyampaikan kebenaran kepada umat atau pengikutnya, dengan sifat qana'ah menjalani tugas dari masa ke masa sampai akhir hayatnya. Dengan mengikuti jejak para *teungku dayah* dan para ulama, maka keberadaan sistem pendidikan *dayah* selalu menjadi jantung hati masyarakat Aceh (Rizal, 1988: 13).

Agar *dayah-dayah* yang tersebar di Aceh mampu menciptakan kader-kader ulama sebagai pemuka agama yang mampu mandiri dan mampu memecahkan masalah-masalah yang rumit di masyarakat,

maka *dayah* harus dapat mendidik para murid *dayah* menjadi manusia yang menguasai ilmu agama, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan tekun, ikhlas semata-mata untuk berbakti dan mengabdikan kepada Allah. Mampu menghidupkan agama Allah dan sunah Rasulullah serta menyebarkan ajaran secara *kaffah*. Berakhlak luhur, berfikir kritis, berjiwa dinamis dan kuat menderita (*istiqamah*). Berjiwa besar, kuat mental dan fisik, hidup sederhana, tahan uji, beribadah, tawadhu' kasih sayang terhadap sesama manusia dan tawakal kepada Allah (Ya'cub, 1988: 13).

Senada dengan tujuan *dayah* tersebut di atas, (M. Yusuf Ahmad 1986: 17) berpendapat, agar tujuan *dayah* dapat tercapai maka sistem pendidikan *dayah* harus,

1. Mendidik calon ulama yang berilmu mendalam, berwibawa dan bertanggung jawab.
2. Mendidik tenaga penggerak agama di kampung-kampung secara bermasyarakat.
3. Mendidik manusia muslim yang dapat menarik masyarakat ke jalan yang benar.
4. Mendidik ulama yang berfanatik dan berfikiran yang lebih banyak kepada keagungan saja, tidak terlalu condong ke dunia belaka.
5. Membina pemuka agama yang dapat menciptakan kader generasi yang akan datang, menjalankan amal ma'ruf nahi munkar.
6. Mendidik ulama yang berjiwa besar dalam memperjuangkan nilai-nilai agama Islam.
7. Mencetak santri yang siap untuk menjadi ulama di masa mendatang.

8. Menjadi pembela agama dalam masyarakat dan dapat mendirikan kehidupan perekonomian sehari-hari ataupun dalam menghubungkan lembaga agama yang dipimpinnya.

Dalam kurikulum *dayah* pada masa revolusi kemerdekaan, berpegang teguh pada pelajaran yang diberikan dari kitab kuning/ klasik. Sedangkan metode pendidikan masih menggunakan cara yang tradisional (Raharjo, 1985: 57). Sehubungan dengan kenyataan ini, pemerintah berusaha memperbaiki kurikulum *dayah* dengan memasukkan pengetahuan umum seperti matematika, PMP, IPS, IPA, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan lain-lain agar gejala kemerosotan dapat teratasi (Brink, 1986: 19).

B. Kedudukan dan Peranan Dayah Dalam Bidang Sosial Budaya

Peranan *dayah* dalam bidang sosial budaya tak dapat dipisahkan dengan peranan alim ulama yang ada di *dayah* tersebut. Karena alim ulama yang dalam masyarakat Aceh sering disebut dengan gelaran *teungku*, selalu berada di tengah-tengah kehidupan *dayah*. Sebutan *teungku dayah* sering digelarkan kepada seseorang, yang telah atau sedang menempuh pendidikan di *dayah*. Sebutan itu tidak memandang berapa lama seseorang belajar di suatu lembaga pendidikan *dayah*. Namun jika dilihat secara ilmiah, ulama yang dimaksud adalah mereka selain memiliki pengetahuan agama yang dalam dan luas juga memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Seseorang ulama harus beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia, serta selalu mengajak umat manusia untuk melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi semua larangan-Nya (Sufi, 1997: 7). Pada umumnya mereka adalah para pemimpin *dayah*

di Aceh. Keulamaan seseorang pimpinan dayah itu sering pula mendapat gelar *Abon, Abu dan Teungku Chiek*.

Ketenaran seorang teungku dayah tidak hanya karena kesalehan dan berilmu tinggi, akan tetapi karena ia sanggup memimpin masyarakat. Dalam masyarakat Aceh ulama atau *teungku dayah* dianggap sebagai simbol pemersatu umat. Pada diri *teungku dayah* itu terpancar sifat yang kharismatik. Kharisma yang dimiliki oleh *teungku dayah* itu menjadi satu kekuatan untuk menggerakkan dan memotivasi rakyat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Para *teungku dayah* dalam mentransfer ajaran agama dan nilai-nilai sosial kepada masyarakat menempuh berbagai cara dan media, antara lain melalui lembaga pendidikan *dayah* dan berbagai media dakwah lainnya. Hikayat merupakan salah satu media dalam memvisualisasikan ajaran-ajaran atau nilai-nilai agama kepada masyarakat. Hikayat yang penuh dengan nilai seni sastra dijadikan sebagai alat yang sangat ampuh oleh *teungku dayah* dalam mengajarkan syari'at Islam. Hikayat ini mengandung petuah-petuah, nasehat-nasehat dan kisah-kisah kehidupan para nabi atau aulia yang dapat menjadi suri tauladan dalam kehidupan umat manusia. Hikayat ini juga mengandung unsur-unsur pendidikan dan moral keagamaan (Alfian, 1977: 200).

Hikayat sebagai media hubungan antara ulama dan *teungku dayah* dengan masyarakat juga dibacakan di *meunasah-meunasah* dan *dayah-dayah* pada malam hari menjelang tidur. Hikayat-hikayat yang dibacakan di tempat ini, biasanya mengandung petuah atau pedoman dalam mengarungi kehidupan dunia menuju ke alam akherat yang lebih baik. Petuah-petuah itu didengar dengan baik oleh para pemuda dan para santri. Hikayat yang dibacakan di *meunasah* ada juga yang mengandung unsur hiburan (pelipur lara) bagi pemuda

dan santri, yang berisi nyanyian-nyanyian tidur. Pada masa revolusi kemerdekaan, hikayat-hikayat ini menjadi hiburan bagi para pemuda dan santri. Namun pada zaman sekarang peranan hikayat sudah mulai tererosi oleh berbagai media informasi dan hiburan lainnya yang kini telah menembus ke pelosok-pelosok desa. Para pemuda sekarang lebih banyak menghabiskan waktu dengan media hiburan yang ditampilkan di layar televisi, radio, tape recorder, video game dan lain-lain.

Dewasa ini pembacaan hikayat sudah jarang terdengar lagi di *meunasah* dan *dayah*. Hal ini disebabkan banyaknya media informasi dan alat-alat hiburan lainnya. Selain itu tingkat kesibukan masyarakat dengan berbagai aktivitas dan pekerjaan juga turut memberikan pengaruh untuk tergesernya peranan dan fungsi hikayat dalam kehidupan masyarakat. Walaupun demikian pada waktu-waktu tertentu, hikayat juga masih dibaca dalam masyarakat sebagai wahana penyampaian informasi pembangunan.

Teungku dayah dalam masyarakat juga berperan sebagai pemimpin dan simbol pemersatu. Sebagai pemimpin informal *teungku dayah* menjadi panutan, tempat bertanya, tempat mengadu berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga mendapatkan petunjuk dan petunjuk darinya. Tidak jarang pula masyarakat dalam bermunajat (memohon) sesuatu kepada Allah SWT melalui bimbingan dan perantaraan *teungku dayah*.

Posisi *teungku dayah* dimata masyarakat desa adalah sosok pemimpin yang sangat kharismatik. Kharisma yang dimiliki para *teungku dayah* telah menjadi alat yang sangat ampuh untuk menghimpun masyarakat dan mengajak umatnya untuk melakukan sesuatu yang dianggap benar. Hal ini didukung pula oleh kondisi masyarakat di pedesaan di Aceh yang sangat patuh dan taat kepada

pernyataan atau perkataan teungku dayah. Kepatuhan kepada para *teungku dayah* tersebut bukanlah kepatuhan semu, melainkan kepatuhan yang sungguh-sungguh dan dilandasi oleh loyalitas yang tinggi. Rakyat tidak berani melawan perintah atau petunjuk teungku dayah, karena dari segi etika moral keilmuan dan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat pedesaan di Aceh adalah melawan perintah teungku dayah sama halnya ingkar terhadap perintah para aulia atau ambya.

Para *teungku dayah* yang biasanya juga bergelar ulama harus selalu berkata dan bertindak benar, sesuai dengan kaidah dan ajaran Islam. Oleh karena itu, para *teungku dayah* atau ulama juga berfungsi sebagai penyampaian risalah atau tuntunan bagi segenap lapisan masyarakat di pedesaan. Dalam menyampaikan risalah inilah para *teungku dayah* pergi dari desa ke desa untuk menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Ia senantiasa berdakwah untuk mengajak masyarakat Islam kepada yang benar dan menjauhi semua larangan tuhan baik di *meunasah*, mesjid, balai-balai pengajian maupun di *dayah-dayah*.

Sebagai mubaligh para *teungku dayah* dalam menyampaikan risalah agama pergi ke desa-desa, berkeliling sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Para *teungku dayah* ini umumnya sangat menguasai retorika berdakwah agar disenangi oleh umatnya. Masyarakatpun antusias mendengarkan isi ceramah yang disampaikan oleh para mubaligh tersebut. Apalagi jika isi ceramah itu agak sedikit keras dan dibumbui dengan humor-humor segar. Apa yang disampaikan oleh para *teungku dayah* itu menjadi pegangan dan tauladan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sangat sering kita mendengarkan pembicaraan masyarakat saat berkumpul beberapa orang yang mendiskusikan hasil ceramah para *teungku dayah* atau

mubaligh tersebut, baik yang menyangkut masalah keduniawian maupun masalah ukhrawi (akhirat). Mereka (para anggota masyarakat) itu dalam setiap pembicaraan selalu merujuk pada isi ceramah *teungku dayah* atau mubaligh tertentu. Misalnya, *teungku Pulan* saat berceramah di desa anu mengatakan begini atau begitu. Perkataan atau isi ceramah alim ulama tersebut dijadikan pedoman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Para *teungku dayah* dalam mengayomi masyarakat selalu mempergunakan lembaga-lembaga pengajian, baik di *dayah* maupun di *meunasah* atau *ranggang*. Mereka menjadi guru pengajian secara suka rela tanpa mengharapkan gaji atau upah dari masyarakat. Untuk menghidupkan *dayah* dan lembaga-lembaga pengajian lainnya, para *teungku dayah* memperoleh bantuan dari swadaya masyarakat antara lain dalam bentuk zakat, infak dan sedekah. Selain ini mereka juga mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam bentuk tenaga dan moril. dengan bantuan dan partisipasi dari masyarakat itulah mereka mampu melakukan misi-misi agama secara optimal.

Selain membina lembaga-lembaga pendidikan *dayah*, sejak masa kesultanan para *teungku dayah* di Aceh juga bergerak dalam bidang pembangunan lainnya, terutama dalam bidang sosial, pembinaan moral, mental dan pertanian. *Teungku dayah* yang bergerak dalam bidang pertanian antara lain: *Teungku Chiek Di Trueng Campli*, *Teungku Chiek Di Ribee*, *Teungku Chiek Di Bambi* dan *Teungku Chiek Di Pasi*. Keempat *teungku* ini ahli dalam bidang irigasi dan pertanian. Tali air yang dibangun oleh *Teungku Chiek Di Pasi* yaitu *Lueng Bintang* sepanjang 40 km. Berikutnya adalah *Teungku Chiek Di Bambi* yang membangun irigasi *Lueng Guda Agam* sepanjang 40 km. *Teungku Chiek Di Trueng Campli* membangun saluran air sepanjang 45 km dan *Teungku Chiek Di Ribee* 35 km.

Pembangunan tali air tersebut telah menyebabkan areal persawahan yang sangat luas di Pidie mendapat pengairan yang cukup (Sufi, 1997: 12).

Para *Teungku dayah* juga ada yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu Tabib (kedokteran) dan karang mengarang seperti Teungku Chiek Kuta Karang. Keahlian dalam bidang ketabiban ini sangat membantu masyarakat pedesaan pada zamannya. Kondisi masyarakat Aceh pada masa Revolusi belum banyak yang mengenal ilmu medis memang sangat membantu dengan kegiatan para *teungku dayah* yang menguasai ilmu ketabiban. Masyarakat di desa-desa jika menderita sakit, selalu meminta pertolongan para *teungku dayah* untuk mendapatkan *peunawa* (penawar). *Peunawa* yang dibuat oleh para *Teungku* sangat diyakini oleh masyarakat dan memang dapat menyembuhkan penyakit.

Peran *teungku dayah* sebagai tabib dalam masyarakat pedesaan di Aceh masih tetap berlangsung sampai kini. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama ini tidak hanya yang berhubungan dengan penyakit jasmani (fisik) tetapi juga menyangkut ilmu jiwa (penyakit rohani/mental). Bahkan jika ada anggota masyarakat yang merasa kehilangan sesuatu, mereka langsung menemui *teungku dayah* yang ada di desa terdekat, untuk minta dido'akan atau memohon petunjuk kepada Allah dengan perantara *teungku* tersebut. Berkat pertolongan dan do'a dari *teungku* tersebut, biasanya barang yang hilang dapat diketemukan kembali. Bahkan seandainya barang yang hilang itu dicuri orang, akhirnya pencuri tersebut dapat diketahui.

Pada bagian lain ada pula ulama seperti Teungku Chiek Di Tanoh Abee dan Teungku Haji Hasan Krueng Kalee yang mempunyai keahlian di bidang ilmu Falaq dan ilmu Hisab. Ilmu Hisab sangat membantu masyarakat dalam menentukan waktu dan jadwal shalat dan jadwal puasa bulan Ramadhan (imsakiyah). Sementara ilmu

Falaq sangat berperan meramal keadaan cuaca, yang sangat penting artinya bagi masyarakat nelayan dan petani. Para nelayan jika hendak melaut selalu memperhatikan keadaan cuaca (bintang), sehingga usahanya membuahkan hasil yang memuaskan. Demikian pula dengan para petani, jika hendak turun ke sawah yang selalu harus sesuai dengan keadaan curah hujan, agar hasil pertaniannya dapat berhasil dengan baik.

Bagi para petani sawah, ilmu Falaq yang dimiliki oleh seorang *teungku dayah* dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk melihat waktu yang tepat turun ke sawah. Jika waktu turun ke sawah telah tiba, bagi masyarakat tradisional di Aceh selalu dimulai dengan upacara *kenduri blang* (kenduri turun ke sawah) yang dipimpin langsung oleh para *teungku dayah*. Setelah dilakukan upacara tersebut, maka dilanjutkan kegiatan turun ke sawah yang pertama dimulai oleh *teungku dayah*. Maksudnya adalah, yang membawa cangkul dan bibit padi pertama adalah *teungku* di desa tersebut. Kemudian baru diikuti oleh para petani lainnya yang ada di desa tersebut. Begitulah pengaruh dan kepercayaan masyarakat terhadap para alim ulama dalam berbagai kehidupan pada masa revolusi dahulu.

Seorang *teungku* besar Aceh yang lainnya, bernama Teungku Muhammad Daud Beureueh yang mempunyai keahlian tidak hanya dalam bidang keagamaan, tetapi juga mempunyai keahlian dalam bidang politik, bangunan, pertanian dan irigasi. Dalam bidang politik ia pernah menjadi Ketua Umum PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo serta Gubernur Kepala Daerah Aceh. Dalam bidang pertanian dan irigasi, ia pernah berinisiatif membuka kembali irigasi (*lueng*) yang telah tertutup dengan menggerakkan masyarakat untuk bergotong royong. Kegiatan ini selesai dikerjakan selama 28 hari. Dia juga memprakarsai

pembersihan muara sungai di dalam kota Sigli yang telah rusak, dalam waktu yang sangat singkat. Siegel menjelaskan bahwa rakyat yang bekerja setiap harinya mencapai 300 hingga 2.000 orang. Masing-masing mereka membawa nasi bungkus (*bu kulah*) dan perbekalan kerja lainnya.

Nilai dan tingkah laku kehidupan masyarakat pedesaan di Aceh memperlihatkan corak yang Islami dalam setiap aspek kehidupannya. hal ini tidak terlepas dari peranan para *teungku* melalui lembaga pendidikan *dayah* sebagai basis kehidupan para ulama. Peranan ulama hasil godogan *dayah* tersebut sangat berpengaruh dalam berbagai pranata sosial dalam masyarakat dengan menguasai lembaga *meunasah* dan *rangrang*. Bahkan pelopor pembangunan *meunasah* atau mesjid sering dipercayakan kepada *teungku dayah*. *Teungku dayah* sering menjadi penggerak yang berdiri di garis terdepan dengan memberikan penerangan kepada masyarakat setempat tentang pentingnya sebuah mesjid atau *meunasah*. *Teungku dayah* pula yang memotivasi masyarakat untuk berderma atau bersedekah demi selesainya sebuah *meunasah* atau mesjid. Keikhlasan masyarakat menyumbangkan sebagian hartanya pada pembangunan mesjid atau *meunasah*, tidak terlepas dari kemampuan para *teungku dayah* dalam menjelaskan kepada masyarakat akan pentingnya lembaga-lembaga tersebut. Para *teungku dayah* ini memotivasi masyarakat dengan berbagai cara, yang kesemuanya itu selalu berorientasi pada nilai-nilai pahala yang akan didapat oleh masyarakat tersebut.

Selain itu, masyarakatpun secara moral menaruh kepercayaan besar pada *teungku dayah* dalam mengelola pelaksanaan pembangunan rumah ibadah itu tanpa curiga sedikitpun. *Teungku dayah* dianggap orang yang paling jujur dan tidak akan memanfaatkan sumbangan dari masyarakat untuk kepentingan pribadi.

Di Aceh, *meunasah* terdapat di setiap pelosok desa. *Meunasah* ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya berbagai aktivitas masyarakat, baik kegiatan sosial maupun kegiatan keagamaan. Semua kegiatan ibadah, mendidik anak, mengurus atau merundingkan hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan umat dan berbagai aktivitas lainnya dipusatkan di *meunasah*. Dari segi bentuk, lantainya yang datar. Dari segi letak, *meunasah* membujur dari utara ke selatan. Sementara rumah-rumah penduduk juga dibangun mengikuti pola *meunasah*. Antara rumah dan *meunasah* terdapat persamaan dan perbedaan.

Persamaannya adalah rumah juga berbentuk persegi panjang. Sementara perbedaannya adalah posisi *meunasah* membujur ke arah kiblat seangkan rumah melintang dari utara ke selatan. Lantai rumah tinggi di bagian tengahnya sedangkan *meunasah* lantainya datar. *Meunasah* juga dimanfaatkan sebagai tempat belajar mengaji bagi anak-anak. Sejak umur 4 tahun anak-anak pedesaan di Aceh sudah diajarkan mengaji oleh orang tuanya ataupun oleh tetangganya. Kemudian pada umur 10 tahun, anak-anak itu pada umumnya sudah mulai diajarkan di *meunasah*, yang dipimpin langsung oleh *teungku imum meunasah* (Imam Menasah). Setelah belajar mengaji anak-anak itu pada umumnya tidur di *meunasah* terutama yang laki-laki. Di tempat inilah anak-anak tersebut dididik berbagai nilai-nilai kehidupan oleh *teungku meunasah* dan dibantu pula oleh tokoh-tokoh agama di desa tersebut.

Materi pelajaran yang diajarkan kepada anak-anak usia tersebut pada umumnya berkisar tentang do'a sholat, praktek sholat, pengetahuan dasar agama dan akhlak. Anak-anak tersebut diajarkan bahwa ia dibesarkan dengan kehidupan *meunasah*, sehingga dalam hidupnya mereka merasa datang dari *meunasah* dan kembali ke *meunasah*. Maksudnya ialah di *meunasah*lah mereka dibentuk dalam

suasana keagamaan, maka diharapkan anak-anak akan terdidik dan terbiasa dengan pola kehidupan keagamaan. Ketika belajar di *meunasah* anak-anak itu dapat melihat langsung praktek-praktek keagamaan seperti sholat berjama'ah, pengajian, perayaan hari-hari besar Islam, menyelesaikan persengketaan, upacara *peugatib* (menikahkan) dan berbagai kegiatan lainnya. Dengan melihat secara langsung praktek keagamaan, maka diharapkan anak-anak tersebut dalam dirinya akan memiliki wawasan keagamaan yang luas. Semua itu tidak terlepas dari perana para *teungku dayah* yang ada di desa-desa tersebut.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini, mulai terjadi pergeseran yang menembus ke pelosok desa. *Meunasah* dan *dayah* tidak sepenuhnya berfungsi sebagai tempat pendidikan anak-anak pra sekolah dan usia sekolah. Sebagian besar mereka telah menyerahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah formal yang memang telah ada di hampir setiap desa. Namun demikian kegiatan-kegiatan keagamaan masih banyak dilakukan di *meunasah-meunasah* dan *dayah-dayah*.

Masyarakat Aceh secara keseluruhan telah menjadi penganut agama Islam, dalam kehidupannya sehari-hari sejauh mungkin dicoba untuk diselaraskan dengan tuntunan agama Islam. Karena itulah, maka sistem budaya etnis yang dimilikinya yaitu adat telah disesuaikan dengan berbagai segi agama Islam, sehingga antara keduanya sudah sukar untuk dipisahkan. Di sini ajaran Islam sudah merupakan bagian dari adat atau telah diadatkan, sehingga sering dikatakan bahwa *adat na dua* (adat ada dua) yaitu *adatullah nyang hana ubah* (ketentuan Allah yang tidak berubah, dan *adat meuhkamah nyang tamong bak hukom* (adat kebiasaan sehari-hari yang tunduk kepada syari'at Islam/hukum Islam). Jadi syari'at dengan adat Islam merupakan suatu yang kembar dan harus dipadukan. Hal ini sesuai

dengan ungkapan Aceh yang tertuang dalam hadih maja yang berbunyi *adat ngon hukom hanjeut cree lagee zat ngon sifeut*. Artinya adat dengan hukum agama tidak dapat dipisahkan seperti benda/unsur dengan sifatnya. Dalam ungkapan tersebut yang dimaksud *hukom* adalah hukum Islam yang diajarkan oleh para *teungku dayah*. Dan yang dimaksud dengan adat ialah kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan yang dikelola oleh pemerintah atau penguasa yang diistilahkan *umara*.

Seorang ulama besar Aceh pada abad XIX, Syeich Abbas Ibnu Muhammad yang terkenal dengan lakapnya Teungku Chiek Kuta Karang, dalam karyanya *Tadhkirat al-Rakidin* (1889) menyebutkan bahwa *adat ban adat, hukom ban hukom, adat ngon hukom sama kembar, tatkala mufakat adat ngon hukom, nanggroe seunang hana goga*. Artinya adat menurut adat, hukum syari'at menurut hukum syari'at, adat dengan hukum syariat sama kembar, tatkala mufakat adat dengan hukum syariat, negeri senang tiada huru-hara (Alfian, 1981: 36). Dari apa yang dikemukakan oleh Teungku Chiek Kuta Karang tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa hubungan antara adat dengan syariat sangatlah erat. Satu dengan yang lainnya saling terkait seperti dua sisi mata uang yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa di dalam masyarakat Aceh terdapat dua jenis kelompok pemimpin, yaitu kelompok pemimpin adat (*umara*) dan kelompok pemimpin agama (*ulama*). Adapun mereka yang tergolong dalam kelompok pemimpin adat (*penguasa/umara*) adalah: *sultan, uleebalang, kepala mukim, panglima sagoe* dan *keuchik*, sedangkan yang tergolong pimpinan agama (*kelompok alim ulama*) yang mengurus masalah keagamaan yang disebut *hukom* yaitu *kadli, imum mukim, teungku meunasah, teungku dayah* dan *teungku rangkang*.

Para pemimpin agama (*teungku dayah*), setelah berperang lebih dari empat puluh tahun, mereka yang masih tinggal pada umumnya sudah tidak mempunyai cukup potensi lagi untuk menghadapi Belanda. Oleh karenanya mereka kebanyakan kemudian mengurus lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang mereka miliki.

Ulama-ulama yang mengurus lembaga pendidikan *dayah* dan *rangkang*, sesuai dengan perkembangan zaman, mereka terpaksa harus melakukan perubahan-perubahan dalam bidang pendidikannya. Misalnya, dengan merubah dari sistem *dayah* yang tradisional ke sistem madrasah yang modern. Hal ini tampaknya mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama setelah masa revolusi fisik berlalu. Dengan demikian telah membuka kesempatan kembali bagi ulama/*teungku dayah* untuk berperan aktif dalam masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat pada masa-masa menjelang kemerdekaan dan awal kemerdekaan. Sama halnya dengan pendidikan yang dikelola oleh Belanda yang telah melahirkan suatu kelompok baru dengan mendirikan suatu organisasi *Atjeh Vereeniging*, maka para *teungku dayah* yang modern juga dalam rangka memperkuat integritas dan solidaritas sesama mereka, pada tanggal 5 Mei 1939 mendirikan organisasi PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Para pengurus PUSA yang baru dibentuk tersebut terdiri dari: Ketua I Teungku Muhammad Daud Beureu-eh, Ketua II Teungku Abdurrahman Matang Glumpang Dua, Sekretaris I Teungku M. Nur El Ibrahimy, Sekretaris II Teungku Ismail Yacob, Bendahara T.M. Amin yang kemudian diganti oleh Teungku H. Mustafa Ali, Komisaris Teungku Abdul Wahab Seulimuem, Teungku H. Syeh Abdul Hamid, Teungku M. Daud, Teungku Usman Lampoh Awe, Teungku Yahya Raden, Teungku Mahmud, Teungku Usman Aziz dan Teungku Ahmad Daman Huri Takengon.

Berhubung organisasi PUSA merupakan organisasi khas Aceh dan dipimpin oleh para ulama *dayah* yang dekat dengan rakyat, maka tidak aneh jika dalam waktu yang relatif singkat organisasi ini meluas ke seluruh pelosok Aceh. Menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda, organisasi PUSA ini juga menunjukkan keaktifannya dalam perjuangan mengusir Belanda di Aceh. Misalnya, dengan bekerja sama dengan Jepang, meskipun kemudian setelah Jepang berkuasa, PUSA menjadi musuh Jepang. Peranan organisasi PUSA ini selanjutnya semakin menentukan pada masa mempertahankan kemerdekaan (1945-1949). Pemimpin-pemimpin PUSA pada waktu itu menjadi penggerak masyarakat, mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat paling bawah. Salah satu contoh adalah empat orang ulama terkemuka dengan mengatas namakan ulama seluruh Aceh untuk berperang melawan Belanda demi keselamatan tanah air, bangsa dan agama. Keempat ulama PUSA tersebut yaitu Teungku H. Hasan Krueng Kalee, Teungku M. Daud Beureueh, Teungku H. Jakfar Sidik Lamjabat dan Teungku H. Ahmad Hasballah Indrapuri. Dalam menghadapi agresi militer Belanda ini, seluruh santri *dayah*, para *teungku*/ulama *dayah* dan seluruh rakyat bahu-membahu berjuang di garis depan. Perang melawan Belanda yang berkobar pada masa revolusi fisik dianggap sebagai perang sabil dan merupakan kelanjutan dari pada perjuangan almarhum Teungku Chiek Di Tiro dahulu. Rakyat dan para santri *dayah* tidak ragu-ragu maju ke medan perang untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia dari rongrongan Belanda.

Dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang baru dan juga pengaruh dari ulama-ulama yang sekolah di luar Aceh (seperti di Sumatera Barat), maka dalam perkembangannya telah melahirkan satu kelompok ulama baru yang modernis. Dengan

demikian *rangkang* dan *dayah* yang dikelolanya pun bercorak baru. Maka tidak aneh jika kemudian muncul *dayah* moderen. Dengan demikian di Aceh kemudian terdapat dua macam *dayah*, yaitu *dayah* tradisional dan *dayah* moderen.

Dayah tradisional, masih melanjutkan sistem pendidikan tradisional, dengan materi pelajaran kitab-kitab klasik yang sering disebut kitab kuning. Di antara *dayah* ada yang mengelola madrasah, bahkan juga pendidikan umum mulai tingkat dasar ataupun menengah. Ada pula *dayah-dayah* besar sampai pendidikan tinggi. Murid-murid boleh tinggal di pondok/asrama, tetapi mereka wajib mengikuti pengajaran kitab-kitab dengan cara sorogan atau bandungan.

Dayah modern yaitu *dayah* yang sistem pendidikannya telah memadukan sistem tradisional dengan sekolah ke dalam pondok. Semua muridnya (santri *dayah*) yang masuk pondok dibagi dalam tingkatan kelas, tidak hanya menonjol dalam bidang pengajian kitab-kitab kuning saja, tetapi perubahan mata pelajaran bidang studi. Demikian pula cara sorogan dan bandungan mulai berubah bentuk menjadi bimbingan individual dan mengadakan ceramah-ceramah umum (Zuharini, 1986: 65).

Dalam usaha meningkatkan pendidikan, *dayah* merupakan salah satu penunjang utama dalam dunia pendidikan di Aceh. Para ulama Aceh telah meningkatkan peranannya yang lebih besar dalam dunia pendidikan dan selalu mempertahankan konsekuensi yang logis, terutama dari segi hubungan batin yang kuat dengan masyarakat. *Teungku dayah* mempunyai *murib-murib* yang bakal menjadi pengikut yang setia dan bersedia untuk mendirikan *dayah*. Demikianlah perkembangan seterusnya dan sudah menjadi tradisi yang turun temurun dari generasi ke generasi.

Dalam kehidupannya, *dayah* mempunyai caranya sendiri dalam mengumpulkan dana, dengan berusaha agar mendapat bantuan dari partisipasi masyarakat. dengan jalan seperti ini, sedikit demi sedikit, pendidikan tradisional dapat diselenggarakan sesuai dengan apa adanya. Akan tetapi cara yang demikian tidak mungkin dapat mempersiapkan ke arah hidup yang baru, karena dewasa ini sulit untuk menerima perubahan, baik tujuan kurikulum maupun sistem dan metodenya yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Kemajuan suatu *dayah* tidak hanya tergantung pada kharisma ulama yang memimpin *dayah* tersebut, tetapi juga kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan, kualitas pengajaran yang diberikan *dayah* dan faktor-faktor lainnya yang juga ikut menentukan. Karena itulah maka, timbulnya minat seorang santri untuk belajar pada suatu *dayah*, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut. Maka tidak aneh, jika terjadi seorang santri pergi belajar ke *dayah* yang jauh, sedang di dekat kampung halamannya ada juga *dayah*.

Dayah merupakan lembaga pendidikan Islam yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat serta mendapat dukungan masyarakat dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam. Dalam pembinaan *dayah*, ada beberapa jalur, di antaranya yaitu: (a) Sistem sorogan, yaitu mempelajari kitab-kitab kuning. Sistem ini dilaksanakan secara individual untuk menguasai pembacaan Al Qur'an secara tepat dan benar. Sistem ini paling sulit untuk dimengerti, karena itu sangat memerlukan ketabahan dan disiplin yang tinggi. Biasanya diterapkan pada tingkat Ibtidaiyah untuk dimatangkan sebelum mengikuti pendidikan lanjutan. (b) Sistem Halaqah, yaitu sekelompok murid mendengarkan guru menterjemahkan, menerangkan dan membahas kitab-kitab kuning yang berbahasa Arab. Setiap murid memperhatikan kitabnya masing-

masing dan jika perlu membuat catatan seperlunya bagi kata-kata atau buah pikiran yang sulit. (c) Sistem klasikal yang biasanya digolongkan menurut tingkatannya. Tingkat Ibtidayah 7 tahun, Tsanawiyah selama 3 tahun. Kemudian ada tingkat yang lebih tinggi yang disebut Bustanul Muhaqiqin. Pada tingkat inilah para santri diharuskan mempelajari kitab-kitab sendiri yang ditunjukkan oleh guru. Maka masing-masing mempelajari kitab-kitab tersebut dan dipecahkan dalam persidangan pengajaran dengan cara berdiskusi di bale-bale yang telah disediakan untuk masing-masing kelompok (Musa, 1988: 10).

C. Peranan Dayah Dalam Bidang Politik

Peranan *dayah* dalam bidang politik pada masa revolusi kemerdekaan sangatlah besar. Hal ini dimungkinkan karena keberadaan *dayah* selalu melibatkan para *teungku*/ulama *dayah* yang sangat berpengaruh dalam kehidupan di masyarakat. Mereka adalah kelompok elite masyarakat yang sangat dihormati dan setiap fatwanya selalu diikuti oleh seluruh rakyat.

Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di Aceh, segera disambut dengan penuh kegembiraan oleh rakyat Aceh, sehingga mewujudkan keadaan yang sangat baik. Kegentingan hilang dengan segera, sedangkan persatuan di antara rakyat dari setiap golongan dan lapisan masyarakat bertambah kuat. Rakyat bersatu padu dalam usaha memenuhi isi dan tujuan proklamasi kemerdekaan (Isider, 1950: 29).

Para ulama/*Teungku dayah* sebagai golongan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Aceh, tahu bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak disenangi oleh Jepang maupun Belanda. Mereka secara terang-terangan ingin

mengembalikan kekuasaan kolonialnya dengan kekuatan senjata. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Oktober 1945, Ulama Aceh, yang dipelopori oleh Teungku Haji Hasan Krueng Kale, Teungku M. Daud Beureueh, Teungku H. Djafar Sidik Lamjabat, Teungku H. Ahmad Hasballah Indrapuri, mengeluarkan maklumat bersama (Talsya, 1990: 17), yang berbunyi sebagai berikut:

Menurut keyakinan kami adalah perjuangan seperti ini, perjuangan suci yang disebut perang sabil. Maka percayalah wahai bangsaku, bahwa perjuangan ini adalah sebagai sambungan perjuangan dahulu di Aceh yang dipimpin oleh almarhum Teungku Chik Di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan yang lain. Dari sebab itu, bangunlah wahaibangsaku sekalian. Bersatu padu menyusun bahu mengangkat langkah maju ke muka, untuk mengikut jejak perjuangan nenek kita dahulu. Tunduklah dengan patuh akan segala perintah pemimpin-pemimpin kita, untuk keselamatan tanah air, agama dan bangsa.

Maklumat bersama itu merupakan fatwa, bahwa perang melawan Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah suatu keharusan dalam agama, dan dapat dinamakan perang sabil, yang jika meninggal dalam perang mendapat pahala syahid. Mereka tidak mau hanya mati sia-sia. Tetapi mereka rela mati, jika matinya itu adalah mati syahid. Mati syahid hanya ada dalam perang sabil, dan yang menentukan orang dapat dinyatakan mati syahid atau bukan hanyalah para ulama.

Fatwa ulama Aceh itu dengan segera beredar ke segala lapisan masyarakat Aceh, baik di desa maupun di kota, sehingga diikuti oleh orang tua dan muda dengan satu tujuan, membela tanah air tumpah darah Indonesia, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus

1945. dengan demikian tertanamlah keyakinan yang membaja dalam hati rakyat Aceh, bahwa berjuang dan berpewrang melawan musuh-musuh Republik Indonesia adalah perang sabil, dan kalau mati namanya mati syahid.

Untuk itu, mereka selalu mengikuti perkembangan perjuangan rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat Aceh pada khususnya. Para *teungku dayah* melihat bahwa negara dan bangsa dalam keadaan genting, terutama sekali setelah mendapat berita tentang hebatnya pertempuran pada 10 Nopember 1945 di Surabaya. Karena itu para *teungku dayah* menyatakan bahwa maklumat bersama tanggal 15 Oktober 1945 belum memadai untuk menghadapi kegentingan negara (Polem, 1972: 9). Untuk itu, harus menyusun rencana yang lebih luas dan harus terjun langsung ke kancah peperangan. Sebagai kelanjutan maklumat bersama 15 Oktober itu, maka pada tanggal 17 Nopember 1945, bertempat di *dayah* Tiro diadakan suatu rapat besar yang dihadiri sekitar 600 orang ulama *dayah* dan tokoh-tokoh masyarakat dalam kabupaten Pidie. Musyawarah tersebut dipimpin oleh Teungku Umar Tiro dan mengambil keputusan mendirikan Barisan Mujahiddin dengan ketua umumnya Teungku Umar Tiro sendiri (Hasjmy, 1985: 203).

Kemudian pada tanggal 28 Nopember 1945 berlangsung musyawarah ulama *dayah* seluruh Aceh bertempat di Mesjid Raya Baiturrahman, di bawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Musyawarah tersebut berhasil menelurkan Barisan Hisbullah dengan ketua umumnya Teungku Muhammad Daud Beureueh serta mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa keadaan sekarang hukum perang Fardlu Ain (Talsya, 1990: 132-133).

Pengurus Hisbullah terdiri dari : Teungku Haji Hasan Krueng Kalee, Teungku Said Abdullah Kayu, Teungku Haji Ahmad Hasballah

Indrapuri, Teungku Haji Makam Gampong Blang, Teungku Muhammad Lampisang, Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku Abdul Wahab Seulimum, Teungku Muhammad Saleh Lambhuk, Teungku Abdul Aziz, Teungku Haji Hamzah Ateuh, Teungku Muhammad Amin, Teungku Muhammad Daud Ulee Lheue, Syekh Marhaban Kruengkalee, Teungku Haji Jakfar Sidiq Lamjabad, dan Teungku Sulaiman Mahmud Uleekareng. Di antara mereka yang terpilih menjadi ketua umum dan wakil ketua umum masing-masing adalah Teungku Muhammad Daud Beureu-eh dan Teungku Haji Hasballah Indrapuri. Sedangkan sekretaris umum, sekretaris I dan II masing-masing Teungku Muhammad Amin, Syekh Marhaban, dan Teungku Sulaiman Mahmud (Talsya, 1990: 203).

Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Desember 1945 Barisan Hizbullah diganti namanya menjadi laskar Mujahidin. Pada waktu itu juga mengeluarkan maklumat yang isinya mengajak seluruh rakyat Aceh untuk berjihad melawan musuh-musuh proklamasi 17 Agustus 1945.

Setelah laskar Mujahidin berdiri di seluruh Aceh, maka organisasinya disempurnakan dan dijadikan sebuah divisi Laskar Rakyat dengan nama Divisi X Teungku Chik Di Tiro dengan Komandan Divisinya bernama Hasballah, kemudian diganti Cekmat Rahmany dan Abdulmuthalib sebagai Kepala Staf. Divisi ini dilengkapi dengan delapan seksi, yang masing-masing dikepalai oleh : Seksi Satu Abdulmuthalib, Seksi II Ilyas Leube, Seksi III A. Hamdany, Seksi IV Hasballah Asyik, Seksi V Said Ali, Seksi VI Ayat Musi, Seksi VII Yusuf Bakhrum, dan Seksi VIII Yusuf Haji Saleh.

Divisi X/Teungku Chik Di Tiro terdiri dari lima resimen, di antaranya yaitu Resimen I berkedudukan di Banda Aceh, Resimen II berkedudukan di Sigli, Resimen III berkedudukan di Bireun,

Resimen IV berkedudukan di Meulaboh, dan Resimen V berkedudukan di Takengon. Pada pertengahan tahun 1946 dibentuk lagi Barisan Berani Mati Lasykar Teungku Chik Paya Bakong, sebagai penjelmaan Tentara Perjuangan Rakyat (TPR), yang lahir pada awal tahun 1946. Markasnya ditempatkan di Idi Aceh Timur, yaitu kota tempat kelahiran Tentara Perjuangan Rakyat, dipimpin oleh Amir Husein Al Mujahid.

Ketika Belanda melakukan Agresi Militer pada tanggal 27 Juli 1947, hampir seluruh wilayah Republik Indonesia berhasil dikuasai oleh Belanda. Pematang Siantar yang menjadi tempat kedudukan Gubernur Sumatera dan Gubernur Muda Sumatera Utara juga dapat diduduki Belanda (Sufi et al., 1997: 72). Hanya Aceh yang belum diduduki Belanda (kecuali Sabang). Tetapi keadaan di Aceh juga genting, karena Belanda sudah bersiap-siap menyerang Aceh lewat Sabang. Selain itu tentara dan barisan kelasykaran telah dikirim ke Medan Area. Pemerintah Republik Indonesia dapat memahami fungsi dan peranan *Teungku dayah* dan para ulama di Aceh. Oleh karena itu, mengangkat Teungku Muhammad Daud beureueh sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo. Pengangkatan tersebut berdasarkan Surat keputusan Wakil Presiden tanggal 26 Agustus 1947 No. 4/WKP/SUM/47 (Ali, 1984: 258). Kemudian diangkat pula pembantu-pembantu Gubernur Militer, baik dari tokoh-tokoh tentara, para cendekiawan maupun *teungku dayah*/ulama. Mereka yang berasal dari tokoh ulama yaitu Haji Halim Hasan, anggota DPD Sumatera Timur, dengan pangkat Letnan Kolonel Tituler dan Said Abubakar, dengan pangkat Mayor Tituler (Talsya, 1990: 160).

Sehubungan dengan agresi Belanda tersebut, Panglima Sumatera Sukardjo Hardjowardoyo mengirim radiogram yang kepada

para pemimpin rakyat Aceh yang isinya merebut dan mempertahankan Medan menjadi tanggung jawabnya.

Dengan adanya radiogram tersebut, beban yang harus dipikul menjadi lebih berat. Rakyat Aceh telah membantu medan perang Sumatera Timur sejak akhir tahun 1946 dan kini harus lebih ditingkatkan lagi untuk merebut Medan. Tugas yang diperintahkan oleh Panglima Sumatera itu disambut rakyat Aceh dengan penuh rasa tanggung jawab.

Untuk itu dibentuk Resimen Istimewa Medan Area (RIMA) di bawah pimpinan Letnan Kolonel Hasballah, putera Teungku di Garot. Ia adalah alumnus Perguruan Nasional Islam PUSA tahun 1943 dan anggota *Gyugun* pada masa pendudukan Jepang. Resimen ini terdiri dari tiga batalyon TRI, dibantu oleh pasukan lasykar rakyat Divisi Rencong. Divisi Teungku Chik Paya Bakong, Divisi Teungku Chik Di Tiro dan Divisi Hasbullah (Sejarah Militer Kodam I/Iskandar Muda, 1972: 124)

Para *Teungku dayah*/ulama di Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur yang tidak langsung terjun ke medan perang, berkewajiban mengumpulkan bahan makanan untuk suplai mereka yang terjun ke Medan Area. Bahan makanan yang dikumpulkan yaitu beras dan daging. Untuk keperluan itu, rakyat Aceh secara suka rela menyerahkan beras, sapi, kerbau dan ternak lainnya.

Untuk kelancaran usaha tersebut, maka pada tanggal 2 Agustus 1947 di Banda Aceh dibentuk Badan perbendaharaan perang Sabil, dengan keputusan Dewan Pertahanan Daerah Aceh No. 7/Dpd. Adapun pimpinan umum dari badan tersebut terdiri dari Teungku Hasballah Indrapuri dan Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap. Badan ini kemudian mendirikan cabangnya di seluruh Aceh, dengan

tugas mengumpulkan sumbangan dari seluruh rakyat Aceh untuk keperluan biaya perang.

Banyaknya laskar rakyat yang dipimpin oleh para *teungku dayah*/ulama, menunjukkan betapa besarnya peranan *dayah* dalam kencah perjuangan dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dari agresi militer Belanda. Dengan demikian, tak dapat diragukan lagi, bahwa keterlibatan *dayah* secara langsung dalam perjuangan pada masa revolusi fisik, baik secara militer maupun diplomasi sangatlah besar andilnya. Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekkah, kekuatan perjuangannya justru terletak pada peran *dayah* dan *teungku dayah* yang mampu menjadi perekat dan pemersatu untuk terus berjuang menentang kolonialisme Belanda yang dianggapnya sebagai *kaphe*.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa selama perang revolusi kemerdekaan (1945-1949), *dayah-dayah* yang tersebar di seluruh Aceh memegang peranan penting dalam pengerahan tenaga pejuang, terutama *murib-murib* dan masyarakat di sekitar *dayah* ke medan peperangan (Sufi, 1996: 17). Dalam menumbuhkan semangat juang rakyat, terutama dalam membentuk motivasi keagamaan melalui semangat perang sabil, peranan *dayah-dayah* sangat besar. Oleh karenanya tidak mengherankan pada masa revolusi fisik banyak *dayah* dan pimpinannya (*Teungku Dayah/Teungku Chiek*) ikut berjuang memanggul senjata. Baru setelah perang mereda, para ulama (*Teungku Chiek/teungku Dayah*) yang masih ada kembali ke tempat semula membangun dan mengurus *dayah* yang telah ditinggalkan.

BAB V

PENUTUP

Dayah sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial tumbuh diam-diam di kota dan desa. Jumlah lembaga ini meningkat dari tahun ke tahun. *Dayah* mempunyai akar sejarah panjang, walaupun *dayah-dayah* besar yang ada sekarang dapat dilacak asal-usulnya sampai abad ke-19 atau awal abad ke-20.

Aceh sebagai daerah yang penduduknya beragama Islam, sebelum Belanda masuk, melaksanakan pendidikan atas dasar agama Islam. Tempat pendidikannya, terutama *meunasah*, *ranggang* dan *dayah*. Dalam perkembangannya, *dayah* sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional dalam sistem pendidikan dan struktur organisasinya tidak banyak mengalami perubahan dari masa ke masa. Pada masa perang berlangsung para ulama yang sebelumnya sebagai pemimpin *dayah*, ada yang langsung terjun ke medan pertempuran dan ada yang meneruskan tugasnya untuk mendidik generasi-generasi yang nantinya dapat meneruskan perjuangan.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa Aceh sebelum masuk Belanda, adalah daerah kerajaan. Kerajaan-kerajaan tersebut beragama Islam, maka dapatlah dipahami, bahwa pendidikan yang berlaku pada kerajaan tersebut adalah pendidikan yang beragama Islam.

Pada masa sebelum perang, Aceh menghadapi unsur-unsur dari luar, seperti Belanda, Portugis dan Inggris yang ingin menguasai Aceh; Perang Aceh-Belanda harus menghadapi Belanda dengan penuh

kesabaran dan kerelaan mengerahkan segala sesuatu, harta dan jiwa sampai pada masa pendudukan Jepang. Pada masa revolusi fisik di Aceh terdapat kesatuan laskar rakyat, di samping angkatan perang Republik Indonesia. Ketiga laskar tersebut, yaitu Devisi Teungku Chiek Tiro barisan Mujahidin, di bawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureu-eh dan Teungku Cek Mat Rahmany; Devisi Teungku Chiek Payabakong yang dilahirkan oleh TPR (Tentara Pejuang Rakyat) di bawah pimpinan Teungku Amin Husen al-Mujahid; dan Devisi Rencong Ksatria Pesindo di bawah pimpinan Ali Hasyimy dan Nyak Neh Lhoknga. Inti dari ketiga laskar ini adalah para ulama dan pemuda *dayah* dan alumninya, sehingga semangat jihadnya sangat tinggi.

Sejarah Aceh menggambarkan betapa gigihnya rakyat dan kebanyakan dari mereka para ulama dan pemuda *dayah* memperjuangkan dan mempertahankan segala sesuatu yang berharga baginya, baik unsur-unsur rohaniyah maupun jasmaniah. Cinta agama mengandung pengertian taat beragama, ketaatan rakyat Aceh pada agama, dapat dianggap juga antara lain, sebagai akibat bahwa daerah ini telah berabad-abad lamanya hidup dalam dunia Islam. Pertautan cinta agama dan cinta tanah air yang menjiwai kehidupan masyarakat Aceh dalam setiap bidang inilah yang merupakan pendorong bagi rakyat dalam menentang setiap usaha kaum penjajah yang ingin berkuasa di Aceh.

Pada masa revolusi, para ulama menghidupkan kembali *dayah-dayah* yang selama perang terhenti aktivitasnya, karena terjun ke medan perang. Aktivitas *dayah* yang dikembangkan pada masa revolusi tidak hanya pada bidang pendidikan agama, tetapi juga mulai mengembangkan kegiatan-kegiatannya dalam pembangunan mengisi kemerdekaan, baik bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Dayah sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat sekitar, sumber yang menghasilkan elite-elite agama. Untuk *dayah-dayah* besar masyarakat sekitar juga mengambil manfaat secara ekonomis, sehingga *dayah* mampu memberi rangsangan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat disekitarnya. Di *dayah-dayah* besar mampu menyerap puluhan bahkan ratusan tenaga kerja dari masyarakat yang ada disekitarnya, memberikan kesempatan tumbuhnya pemasok makanan ringan untuk *murib-murib dayah*, dan usaha-usaha transportasi yang menghubungkan *dayah-dayah* dengan kota. Lebih jauh lagi *dayah* berperan sebagai agen-agen pembaharuan dan pembangunan masyarakat sekiranya. Lembaga pendidikan *dayah* juga berperan sebagai pembinaan kader, baik kader pemimpin agama maupun kader pemimpin bangsa dan negara. Di samping itu, *dayah* juga berperan sebagai tempat pemantapan ideologi keislaman, yaitu suatu keyakinan akan kebenaran yang mutlak dari Islam, sehingga dengan adanya keyakinan semacam ini, ada kesanggupan bagi mereka (*murib*) untuk membela dan memperjuangkan agama Islam dan sekaligus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsanya. Hal itu penting, karena tanpa amannya negara maka kehidupan beragama dan juga bidang lainnya tidak akan merasa aman.

Secara politik *dayah* juga tidak kalah pentingnya pada masa revolusi, berita kemerdekaan Indonesia pada waktu itu banyak yang disampaikan oleh para ulama melalui *dayah-dayah*. Hal itu, karena umumnya kepemimpinan politik di Aceh juga banyak dari kalangan ulama. Dengan demikian, mulai dari corak keagamaan, politik dan sosial budaya diciptakan oleh lembaga-lembaga pendidikan *dayah* yang bertindak sebagai penafsir dan perumus hal-hal yang ideal dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Said

1995 *Berjuang Untuk Daerah*. Banda Aceh: Yayasan Naga sakti.

Galba, Sindu

1991 *Pesantren sebagai Wadah Komunikasi*. Jakarta: Depdikbud.

Gonggong, Anhar (eds)

1993 *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)*. Jakarta: Depdikbud, Proyek IDSN.

Gottschalk, Louis

1983 *Mengerti Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press.

Hasjmy, Ali

1995 *Muhammadiyah dalam Perspektif Cendekiawan Aceh*. Banda Aceh: Gua Hira.

Husaini

1995 "Syeh Mudawali Al-Khalidy Tokoh Pendidikan Islam di Aceh", *Skripsi* Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry.

Husen, Abdullah

1989 "Bandingan terhadap Prasaran Madrasah dan Pembentukan Elit Modernis di Aceh", dalam *Bunga Rampai Temu Budaya Nusantara PKA III*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.

Iskandar

- 1998 *Profil Ulama Tradisional*. Banda Aceh: PPISB Unsyiah.

Ismuha

- 1993 "Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah", dalam Taufik Abdullah (ed), *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali.

Jalil, Darlina M.

- 1990 "Perkembangan Dayah di Aceh", *Skripsi Sarjana Fak. Tarbiyah Jurusan Tadris IPS, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh*.

Makmur, Djohan (ed)

- 1993 *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*. Jakarta: Depdikbud, Proyek IDSN.

M. Thamrin Z.

- 1975 "Pengaruh Pendidikan Islam Pada Rakyat Aceh dalam Menentang Penjajahan Belanda", *Skripsi FKIP Unsyiah*.

Saby, Yusni

- 1998 "Pesantren Unggul dan Calon Ulama: Tantangan dalam Menghadapi Era Globalisasi", dalam *Sinar Darussalam* No. 222 Februari-Maret 1998.

Sufi, Rusdi

- 1996 *Karakteristik Islam di Aceh Abad XIX*. Banda Aceh: BKSNT Banda Aceh.

Sufi, Rusdi, et al.

1997 *Peranan Tokoh Agama dalam Perjuangan Kemerdekaan 1945-1950 di Aceh*. Jakarta: Depdikbud, Proyek IDSN.

Sunny, Ismail (ed)

1980 *Bunga Rampai Tentang Aceh*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Yunus, Muhammad

1979 *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara.

Yusuf, M. Nasir

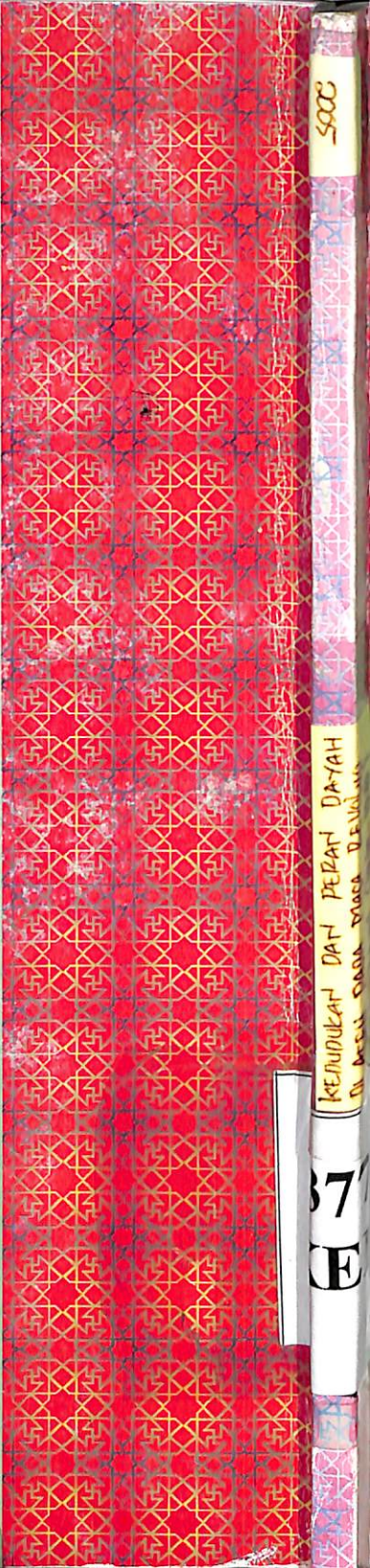
1995 "Perkembangan dan Pertumbuhan Pesantren Syamsudduha Cot Murung Aceh Utara", *Skripsi* Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Zulkarnaini, Abdullah

1997 *Alumni Pesantren Antara Pengukuhan Nilai-nilai Tradisional dan Tantangan Modernitas*. Banda Aceh: PPISB Unsyiah

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Teungku Abbas
Umur : 73 tahun
Pendidikan : Dayah dan SR
Alamat : Dayah Ulee Titi
2. Nama : Teungku Fatahillah
Umur : 37 tahun
Pendidikan : Dayah dan IAIN Ar Raniry Banda Aceh
Alamat : Dayah Ulee Titi
3. Nama : Teungku Hasan Saleh
Umur : 78 tahun
Pendidikan : Dayah dan IAIN Ar Raniry Banda Aceh
Alamat : Lambhuk
4. Nama : Teungku Mukhtar Sufi
Umur : 40 tahun
Pendidikan : Dayah dan SR
Alamat : Dayah Nurul Fatah Seulimuem
5. Nama : Teungku M. Dahlan Al-Fairusy Al Bagdady
Umur : 53 tahun
Pendidikan : Dayah
Alamat : Dayah Tanoh Abee



KENDURUKAN DAN PERAN DA-YAH
DI BERSI SAKA MASA DEWASA

5000

37

E